



**KURIKULUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**TAHUN 2020**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**

Jalan R.S. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan – 12450, Indonesia



**FORMAT KURIKULUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

<b>Nomor Dokumen</b>	<b>UPNVJ/KURIKULUM/SH – SIA/16-00</b>
<b>Revisi</b>	
<b>Tanggal</b>	<b>30 Juli 2020</b>

Disiapkan Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
		
KA. PROGDI	WADEK 1	DEKAN

## DAFTAR ISI

BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
1. Profil UPNVJ .....	4
2. Visi Misi UPNVJ .....	5
3. Visi Misi Fakultas Hukum .....	5
4. Visi Misi Program Studi S1 Hukum .....	6
5. Analisis SWOT .....	6
6. Hasil <i>Tracer Study</i> dan Masukan Pengguna .....	8
7. Tantangan yang dihadapi .....	9
8. Acuan .....	10
BAB II .....	11
TUJUAN PENDIDIKAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN .....	11
1. Tujuan Pendidikan dan Profil Lulusan Program Studi S1 Hukum .....	11
2. Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan .....	12
BAB III .....	14
ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 HUKUM .....	14
1. Bahan Kajian .....	14
2. Skema Kurikulum .....	40
3. Mata Kuliah .....	41
4. Sebaran Capaian Pembelajaran .....	46
5. Deskripsi Mata Kuliah .....	54
6. Peta Kurikulum .....	75
7. Pengkodean Mata Kuliah .....	77
8. Sebaran Mata Kuliah .....	78
9. Beban SKS dan Lama Studi .....	85
10. Ekuivalensi Matakuliah .....	86
BAB IV .....	95
PELAKSANAAN KURIKULUM .....	95
1. Standar Kompetensi Minimal Dosen .....	95
2. Pendekatan Metode Pembelajaran .....	105
3. Program Kuliah Diluar Program Studi .....	108
4. Penilaian .....	108
5. Sarana Pembelajaran/Laboran .....	108
BAB V .....	113
P E N U T U P .....	113

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Profil UPNVJ

Sejarah pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, diawali setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 para pejuang Kemerdekaan RI beralih peran dari partisipasi dalam revolusi fisik ke pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Pada tanggal 15 Desember 1958, di Yogyakarta melalui pemufakatan beberapa pejuang kemerdekaan mendirikan sebuah Akademi yang dinamakan Akademi Pembangunan Nasional "Veteran" dengan membuka jurusan-jurusan: a) Tata Perusahaan; b) Pertanian; c) Teknik Kimia; dan d) Geologi Pertambangan. Akademi tersebut dikembangkan menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional "Veteran" dengan 6 (enam) Fakultas, yaitu: a) Fakultas Teknik Geologi; b) Fakultas Perminyakan; c) Fakultas Tambang; d) Fakultas Teknik Kimia; e) Fakultas Pertanian; dan f) Fakultas Ekonomi.

Perkembangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Selanjutnya UPNVJ) dimulai dengan berdirinya 3 (tiga) Akademi yaitu Akademi Bank, Akademi Tekstil dan Akademi Tata Laksana Pelayaran Niaga Yos Sudarso yang berada dibawah naungan Lembaga Pembinaan Kader Pembangunan (LPKP) yang disahkan dengan Akte Notaris R. Kardiman Nomor: 14 tanggal 7 Januari 1963. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi RI Nomor: 09/Kpts/Menved/1967, tanggal 21 Februari 1967, ketiga Akademi tersebut diintegrasikan kedalam PTPN Veteran dengan PTPN "Veteran" Cabang Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor: Skep/1555/1977 tanggal 30 Nopember 1977 PTPN "Veteran" Jakarta berubah nama menjadi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Cabang Jakarta.

Pada tahun 1980 UPNVJ menambah Jurusan Pendidikan Ahli Teknik (PAT) Informatika dan Komputer. Pada tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dibentuklah Yayasan Pendidikan Pembinaan Keluarga yang menaungi UPNVJ. Pada tahun tersebut juga didirikan Akademi Akuntansi dan Akademi Teknik Veteran yang eksistensinya berada dalam lingkungan UPNVJ, sehingga UPNVJ meliputi 6 (enam) Akademi, yaitu : a) Akademi Bank, b) Akademi Akuntansi "Veteran" c) Akademi Tekstil, d) Akademi Maritim (Teknik Bangunan Kapal), e) Akademi Teknik Veteran, f) PAT Informatika dan Komputer.

Sejak tahun 1993, UPNVJ menjadi universitas yang mandiri secara penuh dan terlepas dari induknya, yaitu Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sesuai Keputusan Menhankam Nomor: Kep/01/II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 terdiri dari 3 (tiga) Fakultas yang menyelenggarakan Program Pendidikan S-1 dan D-III. Perkembangan berikutnya berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/03/II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993, UPNVJ menjadi universitas yang secara administratif wewenang dan tanggung jawabnya berada dibawah pembinaan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) dan secara teknik operasional pendidikan berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c/q Kopertis Wilayah III serta Depertemen Kesehatan.

Dinamika perkembangan UPNVJ selanjutnya adalah menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 120, tanggal 6 Oktober 2014 UPNVJ menjadi PTN baru. Sejak berstatus PTN baru, maka proses penerimaan mahasiswa baru mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk tahun akademik 2015/2016. Selanjutnya, perubahan status ini diikuti juga dengan perubahan statuta universitas yang dikukuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Statu ini kemudian menjadi naungan bagi status hukum UPNVJ. Saat ini UPNVJ Terakreditasi BAN-PT dengan akreditasi B. UPNVJ menyelenggarakan pendidikan program Sarjana, Magister, dan Diploma III yang berada dalam 7 Fakultas, yaitu: Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## 2. Visi Misi UPNVJ

### Visi

Menjadi universitas unggul bertaraf internasional yang inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat

### Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dengan identitas bela negara.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk pembangunan masyarakat Indonesia.
- 3) Melaksanakan tata kelola manajemen universitas yang baik berbasis *good university governance* dan manajemen risiko.
- 4) Mengembangkan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri.
- 5) Mengembangkan *atmosphere academic* yang berlandaskan pada nilai-nilai ke-Indonesiaan, kemanusiaan, dan universal.

## 3. Visi Misi Fakultas Hukum

### Visi

Menjadi Fakultas yang unggul, inovatif dan berdaya saing dalam kajian ilmu hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, beridentitas bela negara ditingkat nasional 2025, regional 2030, dan bereputasi internasional tahun 2035.

### Misi

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, beridentitas bela negara serta berdaya saing.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara ditingkat internasional.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan hukum nasional.

#### 4. Visi Misi Program Studi S1 Hukum

##### Visi

Menjadi program studi yang unggul, inovatif dan berdaya saing dalam kajian ilmu hukum beridentitas bela negara yang terintegrasi dengan teknologi informasi, beridentitas bela negara ditingkat nasional 2025, regional 2030, dan bereputasi internasional tahun 2035.

##### Misi

- 1) Menghasilkan Sarjana Hukum tepat waktu yang mampu melakukan kajian keilmuan dan praktek dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta berdaya saing yang beridentitas bela negara.
- 2) Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi yang inovatif, berdaya saing dan unggul dalam rangka pembangunan hukum nasional.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang hukum untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan hukum nasional.

#### 5. Analisis SWOT

##### a. Strength

- 1) Menjadi bagian dari Perguruan Tinggi Negeri
- 2) Akreditasi B
- 3) Memiliki visi, misi yang diturunkan dari visi dan misi universitas dan fakultas dengan capaian yang terukur.
- 4) Rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa 1:30
- 5) Dosen Tetap dengan pendidilan S3 (Doktor) 12 orang dari 39 jumlah Dosen Tetap (30%)
- 6) Memiliki 1 orang Guru Besar bidang Hukum Pidana
- 7) Memiliki 6 orang Lektor Kepala
- 8) Memiliki 19 orang Lektor
- 9) Memiliki 8 orang Asisten Ahli
- 10) Memiliki 5 orang CPNS Dosen
- 11) Luaran penelitian dosen tetap dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal internasional (scopus), jurnal nasional terakreditasi Sinta.
- 12) Luaran tugas akhir mahasiswa adalah artikel jurnal berbasis penelitian untuk submit dan publikasi pada jurnal internasional, jurnal internasional (scopus), jurnal nasional terakreditasi Sinta.
- 13) Memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang mendapat hibah Kemenkumham RI.
- 14) Memiliki Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintah dan swasta.
- 15) Proses pembelajaran daring melibatkan dosen-dosen Profesor, doktor, dan praktisi dari perguruan tinggi nasional dan internasional, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, serta akademisi yang ahli dibidangnya.

- b. Weakness
- 1) Jumlah Dosen Tetap yang belum Doktor adalah 28 orang dari 39 jumlah Dosen Tetap (70%)
  - 2) Rendahnya peran alumni dalam pengembangan program studi.
- c. Opportunity
- 1) Menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU)
  - 2) Terakreditasi A (BAN-PT)
  - 3) Terakreditasi internasional
  - 4) Memberikan beasiswa kepada dosen tetap untuk studi Doktor.
  - 5) Menjadi *centre of learning* bidang hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum bisnis.
  - 6) Memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi diluar negeri.
  - 7) Memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi didalam negeri.
  - 8) Memperluas kerjasama dengan lembaga peradilan, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dsb.
- d. Threat
- 1) Keberadaan FH Universitas Indonesia.
  - 2) Keberadaan FH dan Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta.
  - 3) Keberadaan Universitas Terbuka
  - 4) Keberadaan Universitas Negeri Jakarta.
  - 5) Keberadaan universitas swasta terkemuka di Indonesia.
  - 6) Masuknya perguruan tinggi luar negeri di Indonesia.
- e. Strategi Pemecahan Masalah
- 1) Kekuatan (*strength*) yang dimiliki program studi S1 Hukum UPNVJ dipergunakan untuk menghadapi ancaman (*threat*) dengan cara:
    - a) Menyusun rencana operasional dan sasaran mutu yang diturunkan dari Renstra FH yang merupakan turunan dari Renstra UPNVJ.
    - b) Menyusun kurikulum kampus merdeka yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan program studi S1 Hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi lain.
    - c) Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
    - d) Menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Modul dan Bahan Ajar tiap semester untuk pembelajaran daring dan luring.
    - e) Mengadakan *workshop micro teaching* untuk dosen tiap semester.
    - f) Mengadakan *workshop* penyusunan proposal penelitian berbasis hibah.
    - g) Mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti program *student exchange*.
    - h) Menyusun pedoman tugas akhir dengan luaran artikel jurnal berbasis penelitian yang di submit dan/atau publikasi pada jurnal internasional, jurnal internasional (scopus), jurnal nasional terakreditasi Sinta.
  - 2) Kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh program studi S1 Hukum UPNVJ dikuatkan oleh adanya kesempatan (*opportunity*). Untuk itu dilakukan hal-hal, sebagai berikut:
    - a) Mendorong universitas untuk menjadi BLU, sehingga rencana-rencana kegiatan mendapat dukungan anggaran yang maksimal.

- b) Mengajukan re-akreditasi BAN-PT pada tahun 2021 dengan target Akreditasi A.
- c) Mengajukan akreditasi internasional melalui Lembaga FIBAA.
- d) Menugaskan dosen tetap yang belum bergelar Doktor untuk melanjutkan studi ke universitas didalam negeri dan luar negeri dengan beasiswa Kemendikbud/LPDP atau biaya mandiri.
- e) Menyiapkan dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala untuk menjadi Guru Besar.
- f) Membuka pusat studi hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, dan bidang hukum lain.
- g) Menyelenggarakan seminar/webinar nasional dan internasional setiap semester yang melibatkan ahli hukum dari program studi S1 Hukum UPNVJ dan perguruan tinggi lain yang sudah bekerjasama maupun yang belum, serta Lembaga-lembaga lain sebagai respon terhadap perkembangan hukum nasional maupun internasional.
- h) Meningkatkan kinerja *tracer study* kepada alumni untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan, serta keterkaitan mata kuliah yang dipelajari dengan pekerjaan.
- i) Melibatkan alumni dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan program studi.
- j) Melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan program studi, contoh: National Conference on Law Studies (NCOLS) dan International Conference on Law Studies (INCOLS) yang diselenggarakan setiap tahun.

## 6. Hasil *Tracer Study* dan Masukan Pengguna

FH UPNVJ senantiasa melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum. *Stakeholder* tersebut terdiri dari: dosen, mahasiswa, dan alumni. Salah satu bentuk partisipasi alumni dalam penyusunan kurikulum adalah dengan mengisi *tracer study*. *Tracer study* yang disebarkan ke alumni dilakukan untuk mengetahui, sebagai berikut:

- a) Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan.
- b) Jenis pekerjaan tempat alumni bekerja.
- c) Kessuaian bidang kerja dengan program studi.
- d) Keterkaitan mata kuliah yang ditempuh dengan jenis pekerjaan.
- e) Kemampuan lain yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan.

Hasil *tracer study* dari 250 responden berdasarkan masing-masing kriteria dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan rata-rata kurang dari 6 bulan, terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan yudisium dengan persentase 84%. Selanjutnya 13% alumni program studi hukum program sarjana mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6-12 bulan. Persentase alumni mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 12-18 bulan hanya 2% dan masih ada alumni yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu lebih dari 18 bulan.
- 2) Persentase tertinggi jenis pekerjaan alumni program studi hukum program sarjana FH

UPNVJ adalah sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dengan persentase 18% dan 4% sebagai guru atau dosen di sekolah atau universitas swasta di Indonesia. Selebihnya jenis pekerjaan yang diperoleh lulusan adalah sebagai karyawan swasta nasional atau multinasional, dan karyawan BUMN sebesar, serta sebagai wiraswastawan sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan alumni selama menempuh pendidikan di FH UPNVJ memenuhi kualifikasi untuk bekerja sebagai PNS dan guru atau dosen.

- 3) Kesesuaian bidang pekerjaan alumni dengan keilmuan atau mata kuliah yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di program studi hukum program sarjana FH UPNVJ, responden yang mengatakan sangat sesuai sebesar 59% dan 23% mengatakan sesuai. Sisanya sebesar 18% menyatakan tidak sesuai. Dengan adanya responden yang menyatakan adanya ketidaksesuaian bidang pekerjaan dengan ilmu sesuai program studi hukum, menunjukkan bahwa kualitas materi dalam proses pembelajaran dan dosen sangat perlu untuk ditingkatkan.
- 4) Keterkaitan materi kuliah dengan jenis pekerjaan 21% menyatakan materi kuliah relevan dengan jenis pekerjaan yang saat ini ditekuni oleh alumni. Namun ada kemampuan lain yang diperlukan oleh lulusan. Persentase kemampuan yang perlu dimiliki oleh lulusan untuk bekerja, yaitu: 23% memerlukan kemampuan menjalin hubungan interpersonal; 22% memerlukan kemampuan bahasa asing (Bahasa Inggris); 17% memerlukan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi; dan 17% memerlukan kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
- 5) Saran yang disampaikan alumni untuk pengembangan program studi adalah 61,2% menyatakan perlu pengembangan infrastruktur; 55,8% memerlukan pengembangan kurikulum; 52,4% memerlukan pengembangan institusi; dan 46,9% perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa.

Stakeholder dilibatkan dalam kegiatan webinar pembahasan kurikulum yang diselenggarakan secara berseri, dengan narasumber yang berasal dari:

#### 1) Luar Negeri

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Dr. Asma Hakimah Ab. Halim       | : Universiti Kebangsaan Malaysia      |
| 2. Assoc. Prof. Dr. Hartini Saripan | : Universiti Teknologi Mara, Malaysia |
| 3. Prof. Aria Nakissa               | : Washington University, USA          |
| 4. Stijn Van Huis, Ph.D             | : Universiteit Leiden, Belanda        |

#### 2) Dalam Negeri

- |   |  |
|---|--|
| 1. Prof. dr. Huala Adolf, LL.M, Ph.D., FCBArb | : Badan Arbitrase Nasional Indonesia   |
| 2. Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH           | : Badan Legislatif DPR RI              |
| 3. Taufik, SH, Sp.N., MKn.                    | : Ikatan Notaris Indonesia             |
| 4. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc    | : Akademisi & Lawyer                   |
| 5. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH        | : Akademisi Universitas Indonesia      |
| 6. Prof. H.R. Benny Riyanto, SH, MHum, CN     | : Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional |

## 7. Tantangan yang dihadapi

Saat ini dunia Pendidikan tidak saja dihadapkan pada Revolusi Industri 4.0. tetapi juga Society 5.0. dimana masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robot untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0, menitikberatkan pada upaya manusia untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang menghubungkan dunia maya dengan dunia nyata secara fisik.

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (selanjutnya disebut FH UPNVJ) sebagai fakultas yang berada dilingkungan UPNVJ telah Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor: 126/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015. Sejak berdiri pada tahun 2000 FH UPNVJ konsisten menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu berkiprah sebagai penegak hukum (hakim, jaksa, dan advokat), legal advisor, legal corporate, mediator, dan berbagai profesi dibidang hukum.

Untuk menghasilkan Sarjana Hukum berkualitas yang dibutuhkan industri, maka FH UPNVJ menyusun perubahan kurikulum menuju Kurikulum Kampus Merdeka (KKM) tahun 2020. KKM menggantikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang memperhatikan kebutuhan industri 4.0. dan sejalan dengan visi misi universitas serta visi misi FH UPNVJ sebagai kampus Bela Negara.

## 8. Acuan

Penyusunan kurikulum Program studi hukum program sarjana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
- 5) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik

## BAB II

### TUJUAN PENDIDIKAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

#### 1. Tujuan Pendidikan dan Profil Lulusan Program Studi S1 Hukum

##### Tujuan

##### a. Umum

Secara umum tujuan pendidikan program studi S1 Hukum adalah menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu melakukan kajian keilmuan dan praktek dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta berdaya saing yang beridentitas bela negara ditingkat nasional dan internasional.

##### b. Khusus

Secara khusus tujuan pendidikan program studi S1 Hukum adalah menghasilkan Sarjana Hukum yang memiliki:

- 1) Kemampuan untuk menghasilkan penelitian dibidang hukum untuk pembangunan hukum nasional.
- 2) Kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dan ikut serta dalam penyusunan perundang-undangan.
- 3) Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses litigasi dan non litigasi.

##### Sasaran

- 1) Lulusan mampu bersaing didunia kerja dan/atau menciptakan lapangan kerja dalam era industry 4.0 dan society 5.0.
- 2) Menyediakan tenaga terampil dan professional dalam menunjang pembangunan hukum nasional.
- 3) Mampu mengikuti perkembangan ilmu dibidang hukum dan teknologi informasi yang mendukung proses litigasi dan non litigasi.
- 4) Mampu meningkatkan indeks penelitian dibidang hukum baik ditingkat nasional dan internasional.
- 5) Mampu menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat baik litigasi dan non litigasi.

##### Strategi Pencapaian

- 1) Meningkatkan kualitas dosen melalui Pendidikan jenjang Strata 3 (S3) bidang ilmu hukum.
- 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyusun kurikulum berbasis industry 4.0 dan society 5.0 yang terintegrasi dengan teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menangani perkara hukum melalui praktek peradilan, pelatihan kemahiran hukum, dan sertifikasi kemampuan litigasi dan non litigasi.
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses pembelajaran.

- 5) Meningkatkan kemampuan komunikasi melalui program student exchange, sertifikasi TOEFL/IELTS, dan sertifikasi *public speaking*.
- 6) Meningkatkan ineks penelitian melalui tugas akhir dengan luaran artikel jurnal berbasis penelitian yang di submit dan/atau publish pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi Sinta, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi.
- 7) Meningkatkan kinerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai laboratorium praktek litigasi dan non litigasi untuk mahasiswa.
- 8) Meningkatkan Kerjasama dengan perguruan tinggi didalam dan luar negeri serta lembaga-peradilan, lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung proses pembelajaran, praktek litigasi dan non litigasi.

**Profil lulusan S1 Hukum adalah:**

- 1) Mampu menginternalisasi nilai-nilai etika, moral, dan bela negara yang terintegrasi dengan teknologi informasi.
- 2) Mampu menerapkan ilmu hukum, dan
- 3) Mampu menganalisa kasus-kasus hukum di masyarakat dalam praktek sebagai penegak hukum, legal advisor, dan legal drafter.

**2. Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan  
Kompetensi Lulusan**

Kompetensi lulusan program studi ilmu hukum, adalah:

- 1) Kemampuan menguasai asas, prinsip, teori dan doktrin ilmu hukum (hukum materil dan hukum formil) dengan kemampuan praktiknya yang selaras dengan moral, etika dan *nilai bela negara dan pembangunan masyarakat Indonesia*.
- 2) Kemampuan menerapkan metode dan logika perpikir, analisis kritis dan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menyusun yurisprudensi, legal opinion, legal contract dan dokumen hukum lainnya sebagai solusi atas perkara hukum yang ada dalam masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
- 3) Kemampuan mempraktikkan prosedural; menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan umum, pengadilan agama, Tata Usaha Negara, Militer baik secara mandiri, dan/atau dalam kelompok dengan menjunjung etika profesi hukum.
- 4) Kemampuan melaksanakan prosedural dan mekanisme manajemen administrasi dan prosedur perkara di pengadilan umum, pengadilan agama, Tata Usaha Negara, peradilan Militer baik secara mandiri, dan/atau dalam kelompok secara profesional, transparan dan akuntabel.
- 5) Kemampuan memberikan advokasi, mediasi, arbitrase, konsultasi, bantuan hukum, dan analisis hukum (*legal analyse*) di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menjunjung tinggi etika profesi.
- 6) Kemampuan menerapkan interpersonal skills, intrapersonal skills, media & information literacy, global citizenship, critical innovative thinking dan respect for religious values dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari.

## Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

Capaian pembelajaran program studi ilmu hukum dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut:

CAPAIAN PEMBELAJARAN/LEARNING OUTCOMES (CP/LO)	
CP/LO 1	Mampu menginternalisasikan ( <i>internalizing</i> ) moral, etika dan <i>nilai bela negara</i> dalam menjalankan profesi dan kehidupan sehari-hari untuk <i>pembangunan masyarakat Indonesia</i> ;
CP/LO 2	Mampu menganalisis ( <i>analyse</i> ) teori hukum bidang hukum tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integratif dengan keindonesiaan dan Kemanusiaan dengan pendekatan multi-disipliner;
CP/LO 3	Kemampuan menerapkan ( <i>applied</i> ) metode dan logika berpikir dan penalaran hukum ( <i>legal reasoning</i> ) untuk menyusun <i>legislative drafting, legal opinion, legal audit, legal contract, legal drafting</i> , putusan dan eksaminasi serta dokumen hukum lainnya sebagai solusi atas perkara hukum yang ada dalam masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya;
CP/LO 4	Mampu mempraktikkan hukum formil di lingkungan badan peradilan dan mahkamah konstitusi secara profesional dengan menjunjung etika profesi;
CP/LO 5	Mampu menerapkan proses tata kelola manajemen administrasi perkara dalam proses persidangan baik secara langsung, <i>e-court</i> maupun <i>e-litigation</i> di lingkungan badan peradilan dan Mahkamah Konstitusi secara profesional dan menjunjung etika profesi.
CP/LO 6	Kemampuan mendisain dokumen hukum dan mempraktikkan advokasi, mediasi, arbitrase dan konsultasi baik dalam bidang perdata, pidana, tata usaha negara sesuai dengan etika profesi;
CP/LO 7	Kemampuan mendisain <i>legislative drafting, legal opinion, legal contract, legal audit</i> dan <i>legal drafting</i> secara profesional
CP/LO 8	Kemampuan mempraktikkan keterampilan komunikasi, berfikir kritis dan inovatif, literasi teknologi informasi, kolaborasi dan <i>teamwork, networking</i> , literasi finansial, respek terhadap sesama dan <i>long life learning</i> .

### BAB III

#### ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 HUKUM

##### 1. Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan turunan dari *Learning Outcomes* sebagai bahan pertimbangan untuk melihat keluasan dan kedalaman mata kuliah, yang dijelaskan dalam table berikut ini:

CAPAIAN <i>LEARNING OUTCOMES</i> (CLO)		BAHAN KAJIAN		MATA KULIAH	
1		2		3	
CLO 1	Mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dan memahami agama secara Moderat dalam NKRI	1	Pengertian, fungsi dan tujuan Agama	1	Pendidikan Agama
		2	Sumber-sumber ajaran agama	2	Etika & Profesi
		3	Konsep ketuhanan dalam Islam		
		4	Internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia		
		5	Manusia sebagai khalifah di Bumi		
		6	Agama dan Ilmu pengetahuan dan teknologi		
		7	Aklakul Karimah, Moral dan etika dalam agama		

		8	Manusia dan Agama		
		9	Nilai-nilai dalam agama		
		10	Internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia		
CLO 2	Mempraktekkan kehidupan beragama dengan prinsip toleransi dan moderasi beragama	1	Hubungan antar umat beragama		
		2	Toleransi beragama		
		3	Moderasi Beragama		
CLO 3	Mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	1	Kewarganegaraan	3	Pendidikan Kewarganegaraan
		2	Nasionalisme	4	Ilmu Negara
		3	Wawasan Kebangsaan		
		4	Identitas Nasional		
		5	Demokrasi		
		6	Hak Asasi Manusia		
		7	Cinta tanah air		
		8	Hak dan Kewajiban Warga Negara		
		9	Wawasan nusantara		
		10	Ketahanan Nasional		
		12	Geo strategi nasional		
		13	Politik dan Strategi Nasional		
2	Pancasila dalam konteks sejarah				

		3	Pancasila dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila	6	Filsafat Ilmu & Logika		
		4	Piagam Jakarta				
		5	Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara				
		6	Pancasila dalam konteks Ketatanegaraan				
		7	Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara				
		8	Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional				
		9	Pancasila sebagai Ideologi				
		10	Relasi agama dalam Pancasila				
		11	Pancasila sebagai sistem Filsafat				
		12	Ideologi Pancasila				
		13	Pancasila sebagai etika politik bernegara				
CLO 4	Mampu menginternalisasi nilai-nilai Bela Negara	1	Cinta tanah air			7	Bela Negara
		2	Kesadaran berbangsa dan bernegara				
		3	Rela berkorban bagi bangsa dan negara				
		4	Kemampuan awal bela negara				
		5	Aktualisasi Pancasila di perguruan tinggi				

		6	Visi,Misi,dan Tujuan Wawasan Kebangsaan		
		7	Paham Kebangsaan dan Globalisasi		
		8	Kebangsaan Indonesia pada era reformasi		
		9	Nilai-nilai kejuangan		
		10	Implementasi Nilai Kejuangan		
		11	Semangat kejuangan		
		12	Implementasi semangat kejuangan		
		13	Memahami dan menerapkan kejuangan		
CLO 1	Mampu menganalisa kasus ketatanegaraan dengan menggunakan teori-teori hukum tata negara	1	Pengertian umum HTN	8	Hukum Tata Negara
		2	Konsep dasar HTN terkait objek, ruang lingkup dan hubungan dengan ilmu lain		
		3	Sejarah ketatanegaraan dan menerapkan HTN dalam kasus-kasus hukum		
		4	Memahami sumber HTN dan hierarki Peraturan PerundangUndangan		
		5	Memahami konstitusi sebagai objek kajian HTN dan memahami penyelesaian kasus HTN melalui MK		
		6	Fungsi kekuasaan negara, lembaga negara dan simbol negara		

		7	Kekuasaan kehakiman		
		8	Menjelaskan konsep negara hukum		
		9	Sistem pemerintahan daerah		
		10	Konsep demokrasi di Indonesia		
		11	Delik		
		12	Konsep Hak asasi manusia		
		13	Partai politik Indonesia		
CLO 2	Mampu menganalisa kasus hukum perdata dengan menggunakan teori-teori hukum perdata	1	Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata	9	Hukum Perdata
		2	Sejarah hukum perdata	10	Hukum Adat
		3	Subjek hukum, tempat kediaman dan domisili	11	Hukum Agraria
		4	Hukum perkawinan		
		5	Hukum benda		
		6	Hak milik (bezit)		
		7	Hak atas benda jaminan		
		8	Perjanjian accecoir		
		9	Pengertian dan sumber-sumber perikatan		
CLO 3	Mampu menganalisa kasus hukum bisnis dengan menggunakan teori-teori hukum bisnis	1	Pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis	12	Hukum Dagang
		2	Badan hukum publik dan badan hukum privat	13	Hukum Perikatan
		3	Kontrak bisnis		
		4	Perseroan terbatas		
		5	Yayasan		

		6	Perkumpulan		
		7	Koperasi		
		8	Perbankan		
		9	Modal Ventura		
		10	Penyelesaian sengketa diluar pengadilan		
		11	Tindak pidana ekonomi		
CLO 4	Mampu menganalisa kasus hukum pidana dengan menggunakan teori-teori hukum pidana	1	Asas hukum pidana	8	Hukum Pidana
		2	Norma dan sanksi dalam hukum pidana		
		3	Penafsiran dalam hukum pidana		
		4	Teori-teori hukum pidan dan penintensir		
		5	Tindak pidana		
		6	Pertanggungjawaban Pidana		
		7	Penghukuman dan pembedaan		
		8	Penyertaan dalam tidak pidana		
		9	Delik		
		10	Alasan pemaan dan alasan pembenar		
CLO 5	Mampu menganalisa kasus internasional dengan menggunakan	1	Istilah hukum Internasional	9	Hukum Internasional
		2	Hakikat dasar hukum internasional		
		3	Hubungan hukum internasional		
		4	Subjek hukum internasional		

	teori-teori hukum internasional	5	Kedaulatan negara		
		6	Yurisdiksi negara		
		7	Suksesi negara		
		8	Tanggung jawab negara		
		9	Sengketa Internasional		
		10	Simulasi penyelesaian		
CLO 1	Mampu menerapkan metoda logika berfikir dan penalaran hukum dengan pendekatan Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan multi disipliner	1	Sumber pengetahuan dan tujuan penelitian	10	Metode Penelitian Hukum
		2	Metode dan esensi ilmiah		
		3	Langkah dan penelitian		
		4	Syarat syarat penelitian		
		5	Ontologis	11	Penulisan Hukum
		6	Epistemologis		
		7	Aksiologis		
		8	Landasan sosiologis,		
		9	Landasan Yuridis		
CLO 2	Mampu menerapkan metoda dalam penyusunan legal opinion	1	Dasar-dasar argumentasi dan analisis hukum	12	Legal opinion
		2	Nilai-nilai dalam penyusunan legal opinion		
		3	Norma-norma dalam penyusunan legal opinion		
		4	Asas hukum dalam penyusunan legal opinion		
		5	Fungsi dan kegunaan penulisan legal opinion		
		6	Filsafat estismologi dalam legal opinion		

		7	Struktur dan sistematika penulisan legal opinion		
		8	Metode ilmiah dalam legal opinion		
		9	Pembuatan legal opinion		
		10	Kegunaan etika nilai dalam legal opinion		
		11	Ajaran positivisme dalam legal opinion		
		12	Ajaran realisme dalam legal opinion		
CLO 3	Mampu menerapkan metoda dalam penyusunan legal audit	1	Proses legal audit dalam suatu institusi	13	Legal Audit
		2	Tugas legal audit		
		3	Teori dan praktek tentang auditing		
		4	Pelaporan hasil audit		
		5	Tindak lanjut hasil audit		
		6	Dokumen dan administrasi audit		
		7	Sistem dan prosedur mengaudit kebijakan SDM		
		8	Permohonan persetujuan pemberian dan pengikatan kredit		
		9	Jaminan dan Agunan		
		10	Percairan Kredit		
		11	Persyaratan jumlah jangka waktu dan bunga		

		12	logika peranan bahasa dan konsep hukum		
		13	Permasalahan legal audit		
CLO 4	Mampu menerapkan metoda dalam penyusunan legal contract	1	Asas dan pengaturan hukum kontrak	14	Perancangan Kontrak
		2	Syarat sah dan unsur-unsur kontrak		
		3	Perjanjian baku		
		4	Perjanjian Nomiinat		
		5	Perjanjian Innominat		
		6	Pelaksanaan kontrak dan wanprestasi		
		7	Berakhirnya kontrak		
		8	Perancangan atau pembuatan kontrak		
		9	Kerangka dan anatomi kontrak		
		10	Tahap-tahap dalam pembuatan kontrak tertulis		
		11	Komparisi dan premis kontrak		
		12	Pembuatam Surat Kuasa		
		13	Pembuatan surat perjanjian bawah tangan		
		14	Pembuatan perjanjian otentik		
CLO 5	Mampu menerapkan metoda dalam	1	Proses Pembentukan Undang-Undang	15	Ilmu Perundang-undangan
		2	Proses Pembentukan Peraturan Daerah		

	penyusunan legal drafting	3	Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan		
		4	Fungsi Peraturan Perundang-Undangan		
		5	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan		
		6	Sinkronisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan		
		7	Pembuatan judul Peraturan Perundang-Undangan		
		8	Pembuatan Naskah Akademik		
		9	Pembuatan Kerangka peraturan perundang-undangan		
		10	Sumber pengetahuan dan tujuan penelitian		
		11	Metode dan esensi ilmiah		
		12	Langkah dan Penelitian		
CLO 6	Mampu menerapkan metoda dalam penyusunan putusan dan eksaminasi	1	Proses peradilan	16	Praktek Peradilan
		2	Isi dan sistematika putusan		
		3	Rechtsvinding Law		
		4	Argumentasi dan bahasa hukum		
		5	langkah-Langkah eksaminasi		
		6	Isi dan sistematika laporan hasil eksaminasi		

		7	Tugas dan evaluasi praktikum dan pelatihan		
CLO 1	Mampu mempraktikkan Hukum Acara Perdata di peradilan umum di Indonesia.	1	Isi dan Sifat Hukum Acara Perdata	17	Hukum Acara Perdata
		2	Hukum Acara Perdata Positif		
		3	Sejarah singkat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia		
		4	Pengertian Gugatan		
		5	Bentuk Gugatan		
		6	Formulasi Surat Gugatan		
		7	Kewenangan Relatif Pengadilan Sengketa Kewenangan Mengadili		
		8	Mengkaji Pengertian dan Tujuan Eksepsi		
		9	Prinsip Pokok Sita		
		10	Sita Revindikasi		
		11	praktek menyusun replik		
		12	praktek menyusun duplik		
		13	praktek menyusun konklusi		
		14	praktek menyusun keputusan		
CLO 2	Mampu menerapkan Hukum Acara pidana di Indonesia.	1	Hak tugas dan kewenangan para pihak dalam Hukum Acara Pidana	18	Hukum Acara Pidana
		2	Penyelidikan dan penyidikan		
		3	Bentuk-bentuk upaya paksa		

		4	Penuntutan		
		5	Surat dakwaan		
		6	Praperadilan		
		7	Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan		
		8	Sistem pembuktian		
		9	Putusan Pengadilan		
		10	Upaya Hukum		
		11	Pelaksanaan Putusan Hakim		
		12	Hukum Acara pidana		
		13	Ganti rugi dan Rehabilitasi		
		14	Macam-macam ganti kerugian		
CLO 3	Mampu menerapkan Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia.	1	Sejarah Peradilan Agama	19	Hukum Acara Peradilan Agama
		2	Kompetensi pengadilan agama		
		3	Alat bukti dan pembuktian		
		4	Proses beracara di Pengadilan Agama		
		5	Konsep dadar hukum acara peradilan agama		
		6	Sumber hukum acara peradilan agama		
		7	Asas-asas hukum acara peradilan agama		
		8	Hierarki organisasi peradilan agama		
		9	Kompetensi relatif dan kompetensi absolut		

		10	Gugat cerai		
		11	Gugat talak		
		12	Penyitaan, pengukuhan dan eksekusi di PA		
		13	Upaya banding kasasi dan peninjauan kembali		
CLO 4	Mampu menerapkan Hukum Acara Tata Usaha Negara di Indonesia.	1	Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;	20	Hukum Acara PTUN
		2	Perbedaan antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata;		
		3	Subyek dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;		
		4	Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;		
		5	Gugatan Tata Usaha Negara;		
		6	Prosedur Pemeriksaan Administratif;		
		7	Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;		
		8	Pemeriksaan Acara Biasa, Pemeriksaan Dengan Acara Cepat dan Singkat;		
		9	Putusan Tata Usaha Negara;		
		10	Upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi,		

			Permohonan Peninjauan Kembali;		
		11	Eksekusi.		
CLO 5	Mampu menerapkan Hukum Acara mahkamah konstitusi di Indonesia.	1	MK dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia;	21	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
		2	Gagasan Judicial Review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi		
		3	Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan MK, dan Susunan Hakim Konstitusi.		
		4	Aspek Umum Hukum Acara MK;		
		5	Permohonan Perkara Konstitusi,		
		6	Penggabungan Perkara Konstitusi,		
		7	Beban pembuktian dan alat bukti,		
		8	Jenis dan sifat persidangan,		
		9	Putusan, Tata cara dan tertib persidangan di MK		
		10	Penafsiran Konstitusi;		
		11	Hukum Acara PUU (Pengujian Undang-Undang) terhadap UUD;		
		12	Analisis suatu kasus tentang pengujian UU terhadap UUD		
		13	Hukum Acara Penyelesaian sengketa lembaga negara;		

		14	Hukum Acara Pembubaran Partai Politik;		
		15	Hukum Acara Penyelesaian sengketa hasil pemilu;		
		16	Hukum Acara Perkara Impeachment;		
CLO 1	Mampu mempraktikkan proses tata kelola manajemen administrasi perkara dalam proses persidangan di pengadilan umum baik secara langsung, e-court maupun e-litigation	1	Organisasi peradilan umum;	22	Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
		2	Administrasi perkara di peradilan umum;		
		3	Prioritas penanganan perkara di peradilan umum;		
		4	Pelaporan penanganan perkara di peradilan umum;		
		5	Kekuasaan Peradilan		
		6	Asas-Asas Peradilan umum		
		7	Proses penyelesaian perkara di peradilan umum		
		8	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara		
		9	Proses pendaftaran perkara pada e-court		
		10	Proses persidangan pada e-litigasi		
2	Mampu mempraktikkan proses tata kelola manajemen administrasi perkara dalam proses persidangan Pengadilan	1	Organisasi peradilan agama;	23	Hukum Acara Peradilan Agama
		2	Administrasi perkara di peradilan agama;		
		3	Prioritas penanganan perkara di peradilan agama;		
		4	Pelaporan penanganan perkara di peradilan agama;		

	Agama di Indonesia baik secara langsung, e-court maupun e-litigation	5	Kekuasaan Peradilan		
		6	Asas-Asas Peradilan Agama		
		7	Proses penyelesaian perkara di peradilan agama;		
		8	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara		
		9	Proses pendaftaran perkara pada e-court		
		10	Proses persidangan pada e-litigasi		
3	Mampu mempraktikkan proses tata kelola manajemen administrasi perkara dalam proses persidangan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia baik secara langsung, e-court maupun e-litigation	1	Organisasi peradilan tata usaha negara	24	Hukum Acara Tata Usaha Negara
		2	Administrasi perkara di peradilan tata usaha negara		
		3	Prioritas penanganan perkara di peradilan tata usaha negara		
		4	Pelaporan penanganan perkara di peradilan tata usaha negara		
		5	Kekuasaan Peradilan		
		6	Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara		
		7	Proses penyelesaian perkara di peradilan tata usaha negara		
		8	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara		
		9	Proses pendaftaran perkara pada e-court		

		10	Proses persidangan pada e-litigasi		
4 CLO 1	Mampu mempraktikkan proses tata kelola manajemen administrasi perkara dalam proses persidangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi di Indonesia baik secara langsung, e-court maupun e-litigation.	1	Organisasi peradilan di mahkamah konstitusi;	25	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
		2	Administrasi perkara di mahkamah konstitusi;		
		3	Prioritas penanganan perkara di mahkamah konstitusi;		
		4	Pelaporan penanganan perkara di mahkamah konstitusi;		
		5	Kekuasaan Peradilan;		
		6	Asas-Asas umum dalam peradilan Mahkamah Konstitusi;		
		7	Proses penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi;		
		8	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara;		
		9	Proses pendaftaran perkara pada e-court;		
		10	Proses persidangan pada e-litigasi;		
	Mampu menyusun dokumen hukum terkait pelaksanaan	1	Surat Dakwaan	26	Lab Peradilan Pidana
2		Eksepsi			
3		Putusan Sela			

	advokasi bidang hukum	4	Tuntutan Pidana		
		5	Pledoi, Replik dan Duplik		
		6	SPDP		
		7	Berita Acara Pemeriksaan		
		1	Pemahaman mengenai kasus perbuatan melawan hukum & perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi);	27	Lab Peradilan Perdata
		2	Penyusunan surat kuasa dan surat gugatan;		
		3	Penyusunan surat kuasa dan surat gugatan;		
		4	Penyusunan replik;		
		5	Penyusunan duplik;		
		6	Penyusunan daftar bukti dan pertanyaan;		
		7	Penyusunan putusan hakim.		
CLO 2	Mampu menyusun dokumen hukum terkait dengan proses mediasi dan konsultasi hukum	1	Pengertian Sengketa Dan Dinamika Penyelesaiannya	28	Hukum Arbitrase & Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan
		2	Pengertian ADR		
		3	Perkembangan ADR		
		4	Sarana Penyelesaian Sengketa		
		5	Pengertian Negosiasi		
		6	Tahap Negosiasi		
		7	Pengertian Mediasi		
		8	Peran dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi		
		9	Tipologi Mediator		

		10	Perkembangan Dasar Hukum Perdamaian Desa dan Adat		
		11	Fungsi Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Desa/Adat		
CLO 3	Mampu menyusun dokumen hukum terkait dengan proses arbitrase	1	Pengertian Sengketa Internasional	29	Hukum Arbitrase & Penyelesaian Sengketa Internasional
		2	Penyebab Munculnya Sengketa Internasional		
		3	Aturan Dasar Penyelesaian Sengketa dalam Piagam PBB		
		4	Prinsip tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa		
		5	Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa		
		6	Prinsip Kesepakatan para pihak yang bersengketa		
		7	Prinsip Exhaustion of Local Remedies		
		8	Prinsip HI tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara		
		9	Arbitrase		
		10	Mahkamah Internasional		
		11	Dewan Keamanan PBB		

CLO 1	Mampu mendesain legal opinion	1	Dasar-dasar argumentasi hukum	30	Legal Opinion
		2	Tahapan analisis hukum	31	Filsafat Hukum
		3	Penerapan legal opinion menurut aliran filsafat hukum		
		4	Struktur dan sistematika penulisan legal opinion		
		5	Etika dalam penyuguhan tulisan legal opinion		
		6	Bahasa penulisan legal opinion		
CLO 2	Mampu mendesain legal audit	1	Fungsi legal audit dalam pengawasan intern		
		2	Auditing dalam teori dan praktek		
		3	Tahapan melakukan auditing		
		4	Proses penalaran hukum		
		5	Praktik penemuan hukum		
		6	Penyusunan argumentasi hukum		
CLO 3	Mampu mendesain legal contract	1	Asas dan pengaturan hukum kontrak	32	Perancangan Kontrak
		2	Syarat sah dan unsur-unsur kontrak		
		3	Perjanjian baku		
		4	Perjanjian Nomiinat		

		5	Perjanjian Innominat		
		6	Pelaksanaan kontrak dan wanprestasi		
		7	Berakhirnya kontrak		
		8	Perancangan atau pembuatan kontrak		
		9	Kerangka dan anatomi kontrak		
		10	Tahap-tahap dalam pembuatan kontrak tertulis		
		11	Komparisi dan premis kontrak		
		12	Pembuatam Surat Kuasa		
		13	Pembuatan surat perjanjian bawah tangan		
		14	Pembuatan perjanjian otentik		
CLO 4	Mampu mendesain naskah peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah	1	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	33	Ilmu Perundang-Undangan
		2	Asas Hukum dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		
		3	Proses Pembentukan Undang-Undang		
		4	Proses Pembentukan Peraturan Daerah		
		5	Proses Penyusunan Prolegnas		
		6	Proses Penyusunan Propemperda		

		7	Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan		
		8	Fungsi Peraturan Perundang-Undangan		
		9	Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		
		10	Struktur peraturan perundang-undangan		
		11	Naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan		
		12	Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan		
		13	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan		
		14	Sinkronisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan		
		15	Pengesahan Pengaturan Peraturan Perundang-undangan		
		16	Pengundangan Peraturan Perundang-undangan		
		17	Pembuatan judul Peraturan Perundang-Undangan		
		18	Pembuatan pendahuluan Naskah Akademik		

		1	a. Penyusunan Kajian teoritis dan praktek empiris NA	34	Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
		2	b. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis NA		
		3	c. Pembuatan Arah, Pengaturan, Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan		
		4	pembuatan Kerangka peraturan perundang-undangan		
		5	a. Judul		
		6	b. Pembukaan		
		7	c. Batang tubuh		
		8	d. Pentup		
		9	e. penjelasan		
		10	f. lampiran		
CLO 1	Mampu mempraktikkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan;	1	Pengantar Mata Kuliah Kompetensi yang ingin di capai	35	Bahasa Indonesia
		2	Kebijakan Bahasa Nasional Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia		
		3	Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)		
		4	Penulisan Angka dan Lambang		
		5	Penulisan Unsur Serapan		
		6	Ideologi		

		7	Dialog		
		8	Sosiologi		
		9	Fungsioleg		
		10	Baku/Standar		
		11	Diksi		
		12	Pola Kalimat		
		13	Alinea		
		14	Penulisan karangan dan teknik penulisan surat		
CLO 2	Mampu menerapkan komunikasi yang efektif dan komunikatif;	1	Describing personalities	36	Bahasa Inggris
		2	Expressing likes and dislikes		
		3	Talking about unusual careers, Describing jobs		
		4	Pros and cons of jobs		
		5	Making unusual requests & Making indirect requests.		
		6	Accepting and declining request & Telling a story		
		7	Describing cultural expectations		
		8	Describing problems		
		9	Making complaint & Explaining something that needs to be done		
		10	Identifying problems		
		11	Coming up with solutions		
		12	Choosing a major		
		13	Discussing ways of learning		

		14	Expressing emotion.		
CLO 3	Mampu mempraktikan higher order thinking skill (HOT);	1	Konsepsi dasar penelitian hukum	37	Penulisan Hukum
		2	Tipe Data dan Alat Pengumpulan Data		
		3	Perbedaan usul penelitian dan rancangan penelitian		
		4	Penyusunan usul penelitian		
		5	Etika penelitian		
		6	Pengolahan dan analisis data sekunder		
		7	Teknik penulisan		
		8	Bentuk-bentuk data sekunder		
		9	Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baku dalam penelitian dan penulisan hukum		
		10	Penelusuran sumber primer dan sekunder serta bahan tersier		
		11	Penulisan abstrak		
		12	Penulisan proposal tugas akhir		
		13	Penulisan daftar pustaka		
		14	Teknik presentasi proposal penelitian tugas akhir		
CLO 4	Mampu menerapkan literasi teknologi	1	Konsepsi dasar penelitian hukum	38	Metode Penelitian Hukum
		2	Tipe Data dan Alat Pengumpulan Data		

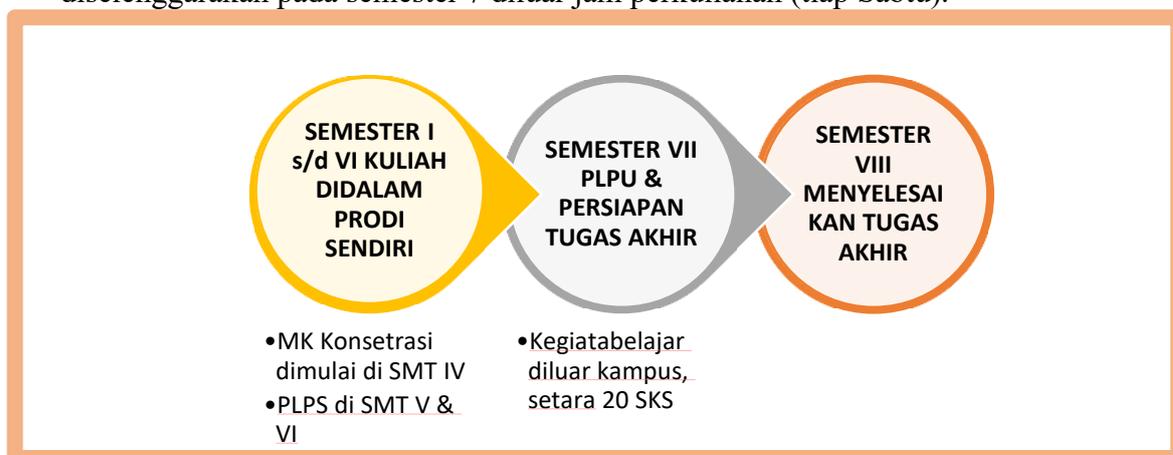
	informasi, media dan publikasi;	3	Perbedaan usul penelitian dan rancangan penelitian		
		4	Penyusunan usul penelitian		
		5	Etika penelitian		
		6	Pengolahan dan analisis data sekunder		
		7	Teknik penulisan		
		8	Bentuk-bentuk data sekunder		
		9	Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baku dalam penelitian dan penulisan hukum		
		10	Penelusuran sumber primer dan sekunder serta bahan tersier		
		11	Penulisan abstrak		
		12	Penulisan proposal tugas akhir		
		13	Penulisan daftar pustaka		
		14	Teknik presentasi proposal penelitian tugas akhir		
CLO 5	Mampu mempraktikkan kolaborasi dan team work;	1	Ketepatan menjelaskan tentang pentingnya perubahan dan pola pikir	39	Filsafat & Logika Berpikir
		2	Ketepatan menjelaskan pengenalan pola pikir	40	Filsafat Hukum
		3	Ketepatan menjelaskan cara peningkatan kreativitas	41	Tugas Akhir
		4	Ketepatan menjelaskan hambatan berfikir kreatif		

			yang dapat menghambat progress sebuah usaha	42	Mata kuliah diluar program studi
		5	Ketepatan menjelaskan sikap dan tindakan yang perlu dimiliki untuk menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan		
		6	Ketepatan menjelaskan tentang konsep risiko		
		7	Memahami Konsep kerjasama dalam membangun usaha		
CLO 6	Mampu menciptakan networking	1	Menciptakan kerjasama tingkat daerah maupun nasional		
		2	Menciptakan hubungan baik dengan rekan bisnis		
		3	Ketepatan menjelaskan peranan etika dalam bisnis		
		4	Ketepatan menjelaskan pemahaman pengertian factor "x"		
		5	Ketepatan menjelaskan cara mencari gagasan baru		
		6	Ketepatan menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan		
		7	Ketepatan menjelaskan tahap tahap dalam memulai usaha baru		

## 2. Skema Kurikulum

Pola kurikulum kampus merdeka tahun 2020 di program studi hukum adalah 7+1+SKPI, yaitu: 7 semester (semester 1-5 dan semester 7-8) kuliah didalam prodi sendiri dengan

metode *blended learning* yang bekerjasama dengan prodi didalam dan diluar kampus sendiri, dan 1 semester (semester 6) kuliah program kampus merdeka, serta ditambah program sertifikasi untuk pemenuhan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diselenggarakan pada semester 7 diluar jam perkuliahan (tiap Sabtu).



Gambar 1. Skema Kurikulum S1 Ilmu Hukum

### 3. Mata Kuliah

Beban sks untuk menjadi Sarjana Hukum adalah 150 sks yang ditempuh selama 7-14 semester. Mata kuliah yang harus ditempuh dikelompokkan dalam jenis-jenis, sebagai berikut:

JENIS MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	KET
<b>I. Mata Kuliah Wajib Universitas</b> <i>(National and University Courses)</i>	MKWU120101	Pendidikan Agama <i>Religious Education</i>	2	
	MKWU120102	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan <i>Pancasila and Citizenship</i>	3	
	MKWU120103	Bahasa Indonesia <i>Indonesian Language</i>	2	
	MKWU120104	Bela Negara <i>National Defense</i>	2	
	MKWU120205	Kepemimpinan <i>Leadership</i>	2	
	MKWU12206	Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika <i>Philosophy of Science and Logic</i>	2	
			<b>Jumlah</b>	<b>13</b>
<b>II. Mata Kuliah Wajib Program Studi</b> <i>(Programme Courses)</i>	HKM120101	Bahasa Inggris <i>English</i>	3	
	HKM120102	Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction of Law</i>	3	Mata kuliah sebagai syarat tempuh mata kuliah selanjutnya

	HKM120103	Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesian Law</i>	3	Mata kuliah sebagai syarat tempuh mata kuliah selanjutnya
	HKM120104	Ilmu Negara <i>General Theory of The State Science</i>	3	Mata kuliah sebagai syarat tempuh mata kuliah selanjutnya
	HKM120205	Bahasa Inggris Hukum <i>English for Law</i>	2	
	HKM120206	Hukum Tata Negara <i>Constitutional Law</i>	3	
	HKM120207	Hukum Administrasi Negara <i>Administrative Law</i>	3	
	HKM120208	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>	3	
	HKM120209	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	3	
	HKM120210	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	2	
	HKM120211	Hukum Adat <i>Customary Law</i>	2	
	HKM120312	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	3	
	HKM120313	Hukum Perikatan <i>Engagement Law</i>	2	
	HKM120314	Hukum Internasional Publik <i>International Law</i>	3	
	HKM120315	Hukum Dagang <i>Commercial Law</i>	2	
	HKM120316	Hukum Telematika <i>Cyber Law</i>	3	
	HKM120317	Hukum Acara Perdata <i>Procedure of Civil Law</i>	3	
	HKM120318	Hukum Acara Pidana <i>Procedure of Criminal Law</i>	3	
	HKM120319	Hukum Acara Administrasi <i>Procedure of Administrative Court</i>	3	
	HKM120320	Hukum Acara Peradilan Agama <i>Procedure of Religious Court</i>	2	
	HKM120421	Hukum dan Masyarakat <i>Society and Law</i>	2	
	HKM120422	Hukum Perburuhan <i>Labour Law</i>	2	
	HKM120423	Metode Penelitian dan Penulisan	3	

		Hukum*) <i>Research Methods and Legal Writing</i>		
	HKM120424	Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislative Drafting</i>	2	
	HKM120425	Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>	2	
	HKM120426	Praktek Hukum (Peradilan) <i>Practice of Court</i>	6	
	HKM120539	Hukum Lingkungan <i>Environmental Law</i>	2	
	HKM120540	Hak Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Rights</i>	2	
	HKM120541	Hukum Antar Tata Hukum	2	
	HKM120654	Filsafat Hukum*) <i>Philosophy Law</i>	2	
	HKM120655	Etika dan Profesi Hukum <i>Legal Professional Ethics</i>	2	
	HKM120876	Tugas Akhir *) <i>Law of Bachelor Thesis</i>	4	
		<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	
<b>III. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi</b>				
1) Konsentrasi Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi negara	HKM120427	Hukum Kelembagaan Negara <i>Institutional State Law</i>	2	
	HKM120428	Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	2	
	HKM120542	Hukum Tata Negara Darurat <i>Emergency Constitutional Law</i>	2	
	HKM120543	Hukum Pengawasan Pemerintahan <i>Government Supervision Law</i>	2	
	HKM120656	Hukum Pemilu <i>Elections Law</i>	2	
	HKM120657	Hukum Pajak <i>Tax Law</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
2) Konsentrasi Hukum Pidana	HKM120429	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana <i>Justice System and Criminal Reform</i>	2	
	HKM120430	Kriminologi <i>Criminology</i>	2	
	HKM120544	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Criminal Acts of Corruption and Money Laundering</i>	2	
	HKM120545	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2	

		<i>Law of Child Protection and Women</i>		
	HKM120658	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	
	HKM120659	Perbandingan Hukum Pidana <i>Comparison of Constitutional Law</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
3) Konsentrasi Hukum Perdata	HKM120431	Hukum Keluarga <i>Family Law</i>	2	
	HKM120432	Hukum Waris Perdata <i>Civil Inheritance Law</i>	2	
	HKM120546	Hukum Benda dan Jaminan <i>Material Law</i>	2	
	HKM120547	Hukum Keluarga Islam (hukum perkawinan dan waris islam) <i>Family Law (Islamic marriage law and inheritance)</i>	2	
	HKM120660	Hukum Perdata Internasional <i>International Civil Law</i>	2	
	HKM120661	Perbandingan Hukum Perdata <i>Comparison of Civil Law</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
4) Konsentrasi Hukum dan Bisnis	HKM120433	Hukum Perusahaan <i>Corporation Law</i>	2	
	HKM120434	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment and Capital Market Law</i>	2	
	HKM120548	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional <i>Economic Law and International Business Transactions</i>	2	
	HKM120549	Hukum Kepailitan <i>Bankruptcy Law</i>	2	
	HKM120662	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2	
	HKM120663	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>Antitrust Law and Unfair Business Competition</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
5) Konsentrasi Hukum Internasional	HKM120435	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Consular Law</i>	2	
	HKM120436	Hukum Perjanjian dan Perdagangan Internasional <i>International Agreement and Trade Law</i>	2	
	HKM120550	Hukum Udara dan Angkasa <i>Air and Space Law</i>	2	
	HKM120551	Hukum Laut	2	

		<i>Sea of Law</i>			
	HKM120664	Hukum Humaniter dan Kepengungsian <i>Humanitarian and Refugees Law</i>	2		
	HKM120665	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>International Dispute Resolution Law</i>	2		
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>		
6) Konsentrasi Hukum dan Teknologi Informasi ( <i>Information Technology and Law</i> )	HKM120437	Hukum dan Teknologi Informasi <i>Law and Information Technology</i>	2		
	HKM120438	Informasi Pengaduan dan Hukum <i>Retrieval Information and Law</i>	2		
	HKM120552	Sistem Pakar dan Hukum <i>Expert System and Law</i>	2		
	HKM120553	Kecerdasan Buatan dan Hukum <i>Artificial Intelligent and Law</i>	2		
	HKM120666	Digital Forensik dan Hukum <i>Digital Forensic and Law</i>	2		
	HKM120667	Litigasi Elektronik <i>E-litigation</i>	2		
			<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
V. Mata Kuliah Pilihan diluar Program Studi (PLPS)		Manajemen Strategic	3	FEB/PT Lain	
		Studi Kelayakan Bisnis	3	FEB/ PT Lain	
		Startup/Unicon	3	FEB/ PT Lain	
		Kebijakan Luar Negeri Indonesia	3	FISIP/PT Lain	
		Strategic Social Media	3	FISIP/PT Lain	
		Komunikasi Visual	3	FISIP/PT Lain	
		Media, Culture, and Society	3	FISIP/PT Lain	
		CSR and Community Development	3	FISIP/PT Lain	
		Internet of Things	2	FIK/Lain	
		Big Data	2	FIK/Lain	
		Pengolahan Citra Digital & Praktek	3	FIK/Lain	
			<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	
			<b>Wajib diambil</b>	<b>20</b>	
V. Mata Kuliah Pilihan diluar Universitas (PLU)	HKM120768	1. Pertukaran Pelajar <i>Student Exchange</i>	20	Mahasiswa memilih 1 (satu) mata kuliah untuk dilaksanakan selama	
	HKM120769	2. Magang (Internship)			
	HKM120770	3. Asistensi Mengajar <i>Teaching Assistant</i>			
	HKM120771	4. Penelitian/Riset			

		<i>Research</i>		1 (satu) semester
	HKM120772	5. Proyek Kemanusiaan <i>Humanitarian Project</i>		
	HKM120773	6. Kegiatan Wirausaha <i>Entrepreneur Activity</i>		
	HKM120774	7. Proyek Independen <i>Independent Project</i>		
	HKM120775	8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik <i>Building a Village/ Thematic Real Work Lecture</i>		
<b>VI. Mata Kuliah Sertifikasi Profesi dan Pendamping Ijazah**)</b>		1. Sertifikasi Penyusunan Bahan Hukum <i>Legal Drafting Certification</i>	0	Kerjasama dg Baleg DPR RI
		2. Sertifikasi Paralegal <i>Paralegal Certification</i>		Kerjasama dg Kemenkum HAM
		3. Sertifikasi Mediasi <i>Mediation Certification</i>		Kerjasama dg MA RI
		4. Sertifikasi Presentasi dihadapan Publik <i>Public Speaking Certification</i>		Kerjasama dengan lembaga sertifikasi
		5. Sertifikasi IELTS/Toefl <i>IELTS/Toefl Certification</i>		IALF/LIA
		6. Sertifikasi Literasi Informasi Teknologi <i>Literacy Information Technology Certification</i>		ISTI
		7. Sertifikasi Kewirausahaan <i>Entrepreneurship Certification</i>		HIPMI
		<b>TOTAL SKS</b>		<b>150</b>

\*) : Dibuka pada semester ganjil dan genap.

\*\*) : Mata kuliah dalam bentuk kursus bersertifikasi sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

#### 4. Sebaran Capaian Pembelajaran

Persebaran *Learning Courses* (Capaian Pembelajaran) tiap mata kuliah dapat dilihat pada table berikut:

NO	DAFTAR MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	●							○

	<i>Pancasila and Citizenship</i>								
2	Pendidikan Agama <i>Religious Education</i>	•							
3	Bahasa Indonesia <i>Indonesian Language</i>						O		•
4	Bela Negara <i>National Defense</i>	•							O
5	Kepemimpinan <i>Leadership</i>								O
6	Filsafat Ilmu dan Logika Penalaran <i>Philosophy of Science and Logic Reasoning</i>								•
8	Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction of Law</i>		•	•					
9	Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesian Law</i>		•	•		O			
10	Ilmu Negara <i>General Theory of The State Science</i>		•	•		O			
11	Sistem Hukum Dunia <i>Legal System in the World</i>		•			O			
12	Bahasa Inggris <i>English</i>		•				O		
13	Hukum Tata Negara <i>Constitutional Law</i>		•	O			O		
14	Hukum Administrasi Negara <i>Administrative Law</i>		•	O			O		
15	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>		•	O			O		
16	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>		•	O			O		
17	Hukum Internasional <i>International Law</i>		•	O				O	

18	Hukum Telematika (Cyber Law) <i>Telematic Law</i>		•	O				O	O
19	Hukum Dagang <i>Commercial Law</i>		•	O				O	
20	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>		•	O				O	
21	Hukum Perikatan <i>Engagement Law</i>		•	O				•	
22	Hukum Ketenagakerjaan <i>Labour Law</i>		•	O				O	
23	Hukum Adat <i>Customary Law</i>		•						
24	Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislative Drafting</i>		•		•	•	•		
25	Penyusunan Dokumen Hukum <i>Preparation of Legal Drafting</i>					•	•	•	
26	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>		•						
27	Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>		•				O		
28	Bahasa Inggris Hukum <i>English for Law</i>						O	O	•
29	Hukum Acara Perdata <i>Procedure of Civil Law</i>		•		•	•	O	O	
30	Hukum Acara Pidana <i>Procedure of Criminal Law</i>		•		•	•	O	O	
31	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara <i>Procedure of State Administrative Court</i>		•		•	•	O	O	
32	Etika dan Profesi Hukum <i>Legal Professional Ethics</i>				•		•		

33	Peradilan Perdata <i>Civil Court</i>		O	•	•		•	•	
34	Peradilan Pidana <i>Criminal Court</i>		O	•	•		•	•	
35	Peradilan Tata Usaha Negara <i>State Administrative Court</i>		O	•	•		•	•	
36	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa <i>Arbitration and Alternative Dispute Resolution</i>		O	•	•		•	•	
37	Filsafat Hukum*) <i>Philosophy Law</i>			•					O
38	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*) <i>Research Methods and Legal Writing</i>		O	•					•
39	Bahasa Inggris untuk Penulisan Akademik dan Presentasi <i>English for Academic Writing and Presentation</i>								O
40	Hukum Kelembagaan Negara <i>Institutional State Law</i>	O	•	O					
41	Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	O	•	O					
42	Hukum Tata Negara Darurat <i>Emergency Constitutional Law</i>	O	•	O					
43	Hukum Pengawasan Pemerintahan <i>Government Supervision Law</i>	O	•	O					
44	Hukum Pemilu <i>Elections Law</i>	O	•	O					
45	Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi <i>Constitutional Law and Constitution Court</i>	O	•	O		O	•		
46	Hukum Lingkungan <i>Environmental Law</i>		•	O					
47	Hukum Pajak		•	O	O				

	<i>Tax Law</i>								
48	Sistem Peradilan Pidana <i>Criminal Justice System</i>		•	O	O				
49	Pembaharuan Hukum Pidana <i>Criminal Law Reform</i>		•	O	O				
50	Kriminologi <i>Criminology</i>		•	O					
51	Hukum Penitensier <i>Penitentiary Law</i>		•	O					
52	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Criminal Acts of Corruption and Money Laundering</i>		•	O	O				
53	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan <i>Law of Child Protection and Women</i>		•	O	O				
54	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>		•	O					
55	Perbandingan Hukum Pidana <i>Comparison of Constitutional Law</i>		•						
56	Hukum Orang dan Keluarga <i>Legal Person and Family</i>		•		O				
57	Hukum Waris Perdata <i>Civil Inheritance Law</i>		•		O				
58	Hukum Benda <i>Material Law</i>		•		O				
59	Hukum Jaminan <i>Guarantee Law</i>		•		O				
60	Hukum Keluarga Islam (hk perkawinan & waris islam) <i>Family Law (Islamic marriage law and inheritance)</i>		•		O				
61	Hukum Perikatan Islam		•		O				

	<i>Islamic Engagement Law</i>								
62	Hukum Perdata Internasional <i>International Civil Law</i>		•	O					
63	Perbandingan Hukum Perdata <i>Comparison of Civil Law</i>		•						
64	Hukum Perusahaan <i>Corporation Law</i>		•	O	O	O			
65	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional <i>Economic Law and International Business Transactions</i>		•	O			O		
66	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment &amp; Capital Market Law</i>		•	O	O	O	O		
67	Hukum Perbankan <i>Banking Law</i>		•	O	O	O			
68	Hukum Asuransi <i>Assurance Law</i>		•	O	O	O			
69	Hukum Kepailitan <i>Bankruptcy Law</i>		•	O	O	O	O		
70	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>		•	O	O	O	O		
71	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>Antitrust Law and Unfair Business Competition</i>		•	O	O	O	O		
72	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Consular Law</i>		•	O			•		
73	Hukum Perjanjian Internasional <i>International Agreement Law</i>		•	O					
74	Hukum Perdagangan dan Keuangan Internasional <i>Law of International Trade &amp; Finance</i>		•	O					
75	Hukum Udara dan Angkasa <i>Air and Space Law</i>		•	O					

76	Hukum Laut <i>Sea of Law</i>		•	O					
77	Hukum Humaniter <i>Humanitarian Law</i>		•	O					
78	Hukum Kepengungsian Internasional <i>Law of International Refugee</i>		•	O					
79	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>International Dispute Resolution Law</i>		•	O			•		
80	Hukum dan Teknologi Informasi <i>Law and Information Technology</i>		•	O		•			
81	Pemrosesan Gambar dan Hukum <i>Processing Image and Law</i>		•	O		•			
82	Kecerdasan Buatan dan Hukum <i>Artificial Intelligent and Law</i>		•	O		•			
83	Hukum komunikasi dan multimedia <i>Communication and Multimedia Law</i>		•	O		•			
84	Informasi Pengaduan dan Hukum <i>Retriefal Information and Law</i>		•	O		•			
85	Digital Forensik dan Hukum <i>Digital Forensic and Law</i>		•	O		•			
86	Sistem Pakar dan Hukum <i>Expert System and Law</i>		•	O		•			
87	Litigasi Elektronik <i>E-litigation</i>		•	O		•			
88	Pertukaran Pelajar <i>Student Exchange</i>								•
89	Magang <i>Internship</i>								•
90	Asistensi Mengajar <i>Teaching Assisistence</i>								•
91	Penelitian <i>Research</i>								•

92	Proyek Kemanusiaan <i>Humanity Project</i>								●
93	Kegiatan Wirausaha <i>Enterpreneurship</i>								●
94	Proyek Independen <i>Independent Project</i>								●
95	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik <i>Building a Village / Thematic Real Work Lecture</i>								●
96	Sertifikasi Penyusunan Bahan Hukum <i>Legal Drafting Certification</i>			●		●	●	●	
97	Sertifikasi Paralegal <i>Paralegal Certification</i>			●	●	●	●	●	
98	Sertifikasi Mediasi <i>Mediation Certification</i>						●		
99	Sertifikasi Presentasi dihadapan Publik <i>Public Speaking Certification</i>								●
100	Sertifikasi IELTS/Toefl <i>IELTS/Toefl Certification</i>								●
101	Sertifikasi Literasi Informasi Teknologi <i>Literacy Information Technology Certification</i>								●
102	Sertifikasi Kewirausahaan <i>Enterpreneurship Certification</i>								●
103	Tugas Akhir *) <i>Law of Bachelor Thesis</i>								●
	CP Penuh: ●	3	70	11	10	15	13	8	17
	CP Parsial: O	6	43	50	0	11	16	9	6

	Persentase CP Penuh	2, 9	61,9	18	9, 7	57, 7	13	7, 8	16, 5
	Persentase CP Parsial	5, 8	38,0 5	82	0	43, 3	15	8, 8	9

## 5. Deskripsi Mata Kuliah

NO	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan <i>Pancasila and Citizenship</i>	Matakuliah ini menjelaskan tentang Pengantar Dan Landasan Hukum Pendidikan Pancasila, Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Pancasila Sebagai Sistem filsafat, Sejarah Lahirnya Pancasila, Pancasila Dalam Konstitusi Negara, Pancasila Sebagai Etika Moral Bangsa, Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila Dalam Kajian Bela Negara, Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Di Era Reformasi
2	Pendidikan Agama <i>Religious Education</i>	Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ragam bahasa dan mampu menjelaskan Ejaan Yang Disempurnakan dalam penulisan karangan serta penulisan surat
3	Bahasa Indonesia <i>Indonesian Language</i>	Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ragam bahasa dan mampu menjelaskan Ejaan Yang Disempurnakan dalam penulisan karangan serta penulisan surat.
4	Bela Negara <i>National Defense</i>	
5	Kepemimpinan <i>Leadership</i>	Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang kepemimpinan dari sisi manajemen dan pengembangan karakter kepemimpinan yang ideal dan perubahan perilaku  Pembahasan mencakup materi pembangunan karakter pemimpin, membangun kerja sama dalam sebuah tim, komunikasi efektif, kreatifitas, koordinasi, pengendalian emosi, masalah etika dan tantangannya, berfikir logis dan berfikir kreatif, proses-proses dalam pemecahan masalah

		dan pengambilan keputusan , negosiasi, digital literacy, perubahan dalam implementasi bela negara dan perubahan global.
6	Filsafat Ilmu dan Logika Penalaran <i>Philosophy of Science and Logic Reasoning</i>	
7	Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction of Law</i>	Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum merupakan Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum yang diberikan diawal semester, sebagai mata kuliah prasyarat dari semua mata kuliah di bidang ilmu hukum dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa fakultas hukum. Oleh sebab itu, PIH merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para mahasiswa sebelum mendalami kuliah selanjutnya tentang hukum. Pada MK PIH juga bermaksud menanamkan kerangka hukum secara umum dan tidak terikat tempat dan waktu yang bersifat universal.
8	Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesian Law</i>	Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah berobyek hukum, dengan menunjuk keadaan hukum negara tertentu ( <i>Ius Constitutum</i> ), yaitu hukum Indonesia. Mata kuliah ini mengenalkan tentang tata hukum Indonesia dan sejarah tata hukum Indonesia, sistem hukum civil law dan common law, Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Adm. Negara (HAN), Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Bisnis, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Internasional, Hukum Militer , serta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.
9	Ilmu Negara <i>General Theory of The State Science</i>	Mata kuliah Ilmu Negara memberikan pengetahuan dasar tentang negara, mata kuliah ilmu negara juga memberikan aspek keilmuan terkait kualifikasi, hakikat tujuan dan fungsi negara, serta teori teori kekuasaan dan jaran kedaulatan dalam bernegara
10	Sistem Hukum Dunia <i>Legal System in the World</i>	Mata kuliah ini mempelajari system hukum yang berkembang di dunia dari masa ke masa

11	Bahasa Inggris <i>English</i>	Mata kuliah ini membahas tentang fungsi bahasa Inggris 3 sebagai kemampuan dalam memecahkan masalah hukum terutama tentang Intellectual Property and Copyright Law 1, Basic legal terms 1 dan Legal Vocabulary: Contract Law 1
12	Hukum Tata Negara <i>Constitutional Law</i>	Mata kuliah ini mahasiswa mempelajari mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas yang terdapat dalam HTN, baik yang tertulis maupun tidak tertulis khususnya objek dan lingkup kajian HTN), sejarah ketatanegaraan Indonesia , Menyimpulkan Menyimpulkan mengenai konvensi ketatanegaraan
13	Hukum Administrasi Negara <i>Administrative Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang hukum administrasi negara dalam kajian negara dalam kondisi dinamis baik dari bentuk negara, hubungan HAN dengan hukum lainnya dan kajian lain terkait HAN.
14	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>	Capaian pembelajaran lulusan yang diberikan pada mata kuliah  Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis buku I, II, III,IV, KUHD,Undang – Undang Perkawinan dan Undang – Undang Pokok Agraria
15	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	Mata kuliah ini mahasiswa mempelajari mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang tertulis maupun tidak tertulis khususnya yang terkandung dalam Buku ke 1 KUHP (Pasal 1 sampai 103). Sehingga dapat mempergunakannya dalam praktek hukum maupun kegiatan akademik lainnya ketika menempuh studi pada S1 maupun jenjang Pasca Sarjana.
16	Hukum Internasional <i>International Law</i>	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib fakultas yang membahas kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, dan antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Oleh karena tidak adanya mata kuliah pengantar hukum internasional maka mata kuliah hukum internasional ini juga berposisi sebagai mata kuliah pengantar. Ruang lingkup hukum internasional yang akan dibahas dalam mata

		<p>kuliah ini adalah subjek hukum intrenasional, sumber-sumber hukumnya, dan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu beberapa cabang dari hukum internasional seperti: Hukum Laut Internasional, Hukum Humaniter, Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Penyelesaian Sengketa Internasional dan lain sebagainya akan dibahas.</p>
17	<p>Hukum Telematika <i>Telematic Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini mempelajari regulasi yang bersifat Internasional dan nasional. Pengantar kejahatan dan teknologi; Istilah, pengertian, dan ruang lingkup Cybercrime; Hukum pidana; Hukum perlindungan konsumen; Hukum internasional; Hukum telekomunikasi; Hukum media; Internet dan perkembangannya; Sifat Internet dan ketidaktentuan Geografis; Jurisdiksi yang diterapkan terhadap kasus; Ketentuan International (Konvensi Cybercrime; ) Ketentuan nasional (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik); dan Analisis Kasus</p>
18	<p>Hukum Dagang <i>Commercial Law</i></p>	<p>Mata kuliah ini membahas tentang regulasi, konsep dan implementasi dari hukum dagang secara umum, hukum perusahaan, badan usaha (badan hukum dan bukan badan hukum), surat berharga, lembaga pembiayaan, penanaman modal, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Asuransi, Hukum Persaingan Usaha dan penyelesaian sengketa hukum dagang. Metode yang digunakan adalah Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan student center learning (pembelajaran berpusat pada mahasiswa). Para mahasiswa didukung dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Ada empat kegiatan (metode) utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yaitu: Presentasi (penyajian) materi oleh dosen, presentasi oleh mahasiswa, diskusi kelas berbasis kelompok dan Penugasan. Metode penilaian dilakukan melalui Tes berbasis media elektronik (quiziz, kahoot, turnitin) Rubrik untuk Penilaian produk (resume, makalah), penilaian kinerja (presentasi dalam diskusi kelas, partisipasi dalam perkuliahan) dan Penilaian sikap (perilaku selama mengikuti kuliah dan ketaatan terhadap aturan).</p>

19	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	Mata kuliah ini memberikan gambaran pada mahasiswa bagaimana pengaturan dan pengelolaan agraria khususnya hak-hak penguasaan atas tanah agar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia, konsepsi dan prinsip-prinsip hukum tanah, hak-hak penguasaan atas tanah, pengalihan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak jaminan atas tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan landreform, serta implementasinya dalam segala perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut hak-hak atas tanah baik terkait subjek dan objeknya dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, peneliti, akademisi maupun pejabat umum, juga implementasi keilmuan dalam bentuk produk-produk hukum berupa regulasi, akta otentik yang sesuai dengan undang-undang, kode etik serta peraturan lainnya yang terkait.
20	Hukum Perikatan <i>Engagement Law</i>	Mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi azas, teori, konsep-konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil mengenai ketentuan umum hukum perikatan yang meliputi perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami asas, teori, konsep-konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil mengenai ketentuan umum hukum perikatan, yang meliputi perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang dan mampu untuk memecahkan masalah kasus-kasus yang terjadi, baik substansi hukum maupun yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya, mahasiswa diharapkan menjadi ilmuwan yang memiliki keahlian dalam ilmu hukum, berwawasan luas, pemikiran yang holistic, tidak egois, kritis namun tidak akan lepas dari cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai Pancasila, serta mampu mengimplementasikan perilaku bela negara.

21	Hukum Perburuhan <i>Labour Law</i>	Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami arti dan sifat dari hukum perburuhan. Dimana hukum perburuhan mengatur beberapa system serta mekanisme dalam mengatur ketenagakerjaan baik dalam hal pengupahan, penempatan maupun perlindungan tenaga kerja baik dalam negeri maupun tenaga kerja asing.
22	Hukum Adat <i>Customary Law</i>	Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap dasar, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam memahami Hukum Adat. Hukum Adat di Perguruan Tinggi adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ilmu hukum dari sumber utamanya secara tekstual dan kontekstual. Upaya dimaksud dilakukan melalui kegiatan perkuliahan, bimbingan, latihan, dan pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multiperspektif.
23	Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislative Drafting</i>	Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan dengan mengetahui system peraturan perundang-undangan, asas hukum dalam peraturan perundang-undangan, landasan formal dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan serta mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan itu terbentuk.
24	Penyusunan Dokumen Hukum <i>Preparation of Legal Drafting</i>	Mata kuliah ini membahas sistematika perancangan naskah hukum, perancangan kontrak, atau MoU. Untuk mempermudah proses kerjanya, perusahaan akan membuat beberapa dokumen pengikat, seperti adanya janji pra kontrak yang berisi tentang klausula-klausula penting dalam kontrak.
25	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang kajian tentang sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Hadist, serta ijtihad ulama yang diimplementasikan pada penyelesaian masalah di masyarakat baik di pengadilan agama maupun penyelesaian diluar pengadilan.

26	Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>	Mata kuliah ini mempelajari pengertian hak asasi manusia (HAM) dan hukum HAM, ruang lingkup, sifat, teori-teori, sejarah perkembangan HAM, hubungan HAM dengan konsepsi negara hukum dan demokrasi, prinsip-prinsip HAM dalam hukum positif, prinsip-prinsip tentang persamaan hak, instrument hukum HAM (internasional, regional, dan nasional), Lembaga-lembaga perlindungan HAM, pencegahan penanggulangan dan peradilan HAM.
27	Bahasa Inggris Hukum <i>English for Law</i>	Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris Umum (GE). Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang bagaimana menggunakan kosa kata Bahasa Inggris Umum (GE) dalam kalimat sederhana serta menggunakannya dalam keterampilan berbicara, membaca dan menulis dengan benar.
28	Hukum Acara Perdata <i>Procedure of Civil Law</i>	Mata kuliah Peradilan Perdata adalah mata kuliah yang dimulai dari praktek membuat hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum paraktek persidangan yaitu: Praktek membuat Surat Kuasa Khusus, Surat Permohonan/Surat Gugatan, Surat Jawaban Gugatan (termasuk Eksepsi dan Gugatan Balik), Replik dan Duplik serta praktek membuat Putusan Pengadilan
29	Hukum Acara Pidana <i>Procedure of Criminal Law</i>	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengertian Hukum Acara Pidana, hak, tugas dan kewenangan dalam Hukum Acara Pidana, maksud dan tujuan penyelidikan dan penyidikan, bentuk-bentuk upaya paksa, penuntutan, peradilan, eksekusi dan ganti rugi.
30	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara <i>Procedure of State Administrative Court</i>	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tindakan seseorang/pribadi maupun badan hukum yang mempertahankan hak-hak dan cara untuk mempertahankan dan menegakan hukum administrasi negara di muka peradilan tata usaha negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
31	Etika dan Profesi Hukum	Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menguraikan yang berkaitan

	<i>Legal Professional Ethics</i>	dengan etika secara umum maupun secara khusus, termasuk kode etik beberapa profesi yang terkait dengan profesi hukum. Paham terhadap arti penting dan kedudukan etika profesi dalam pengantar etika, moralitas, dan integritas aparat hukum dan penegak hukum. Dengan memahami kode etik mahasiswa pada saat memasuki suatu profesi tertentu mampu mengimplementasikan kode etik yang menjadi pedoman kerjanya, dalam rangka membangun Indonesia yang berkesesuaian dengan fondasi etika yang berakar pada Pancasila, sebagai jangkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
32	Peradilan Perdata <i>Civil Court</i>	Mata kuliah Peradilan Perdata adalah mata kuliah yang dimulai dari praktek membuat hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum paraktek persidangan yaitu: Praktek membuat Surat Kuasa Khusus, Surat Permohonan/Surat Gugatan, Surat Jawaban Gugatan (termasuk Eksepsi dan Gugatan Balik), Replik dan Duplik serta praktek membuat Putusan Pengadilan
33	Peradilan Pidana <i>Criminal Court</i>	Mata kuliah ini ada pada bidang hukum pidana formilyang menitikberatkan aspek praktik pada proses peradilan. Mata kuliah ini merupakan aspek teoritis yang menjadi modal utama untuk menempuh LAB Peradilan Pidana. Metode pembelajaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat teoritis sebagai pengantar untuk praktik dan penyampaian materi yang bersifat praktis-aplikatif.
34	Peradilan Tata Usaha Negara <i>State Administrative Court</i>	Mata kuliah ini membahas dasardasar PTUN, subyek dan obyek sengketa TUN, Kompetensi PTUN, alur penyelesaian sengketa TUN, gugatan, schorshing, pembuktian, putusan, upaya hukum dan eksekusi. Dengan mengikuti matakuliah Hukum Acara PTUN, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisa tahap-tahap beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.
35	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa <i>Arbitration and Alternative Dispute Resolution</i>	Merupakan mata kuliah hukum internasional di bidang penyelesaian sengketa internasional dengan materi sajian meliputi : pendahuluan, prinsip - prinsip penyelesaian sengketa secara damai, penyelesaian sengketa internasional yang bersifat nonlitigasi, penyelesaian sengketa internasional yang bersifat litigasi, penyelesaian

		sengketa internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB, penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan, penyelesaian sengketa di organisasi internasional.
36	Filsafat Hukum*) <i>Philosophy of Law</i>	Perkuliahan Filsafat Hukum diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mereka dapat mempelajari ilmu hukum lebih mendalam, setelah mereka menempuh dan lulus mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia. Selain dari itu diberikan mata kuliah Filsafat Hukum dimaksudkan sebagai rangkuman untuk mencegah bahwa si calon sarjana karena pendidikan spesialisasinya jangan sampai kehilangan pandangan atas lapangan Ilmu Hukum sebagai suatu keseluruhan. Diharapkan pula dapat dijadikan sebagai bekal mereka apabila sudah terjun kemasyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pembinaan. Pendidikan Kewarganegaraan. Esensi materi perkuliahan ini antara lain meliputi peristilahan, pengertian, dan sejarah serta ruang Filsafat Hukum.
37	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*) <i>Research Methods and Legal Writing</i>	Matakuliah ini mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan tujuan, teori dan perkembangan sebuah penelitian. Penelitian dalam hukum harus menjelaskan mengenai peran dalam hukum itu sendiri dengan menggunakan peran logika serta model legal reasoning yang digunakan.
38	Bahasa Inggris untuk Penulisan Akademik dan Presentasi <i>English for Academic Writing and Presentation</i>	Matakuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menulis artikel berbahasa Inggris untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional, serta diseminarkan dalam symposium atau seminar internasional.
39	Hukum Kelembagaan Negara <i>Institutional State Law</i>	Hukum Kelembagaan Negara (HKN) sebagai salah satu Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) memiliki posisi untuk mendukung pengetahuan dan keterampilan mahasiswa mengenai Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Negara memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan Negara terutama mengenai teori - teoridan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis, lembaga Negara, hubungan antar lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara.
40	Hukum Pemerintahan Daerah	Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah

	<i>Local Government Law</i>	untuk menganalisis problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Bertujuan memberikan pemahaman tentang pengaturan pemerintahan daerah, struktur pemerintahan daerah, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
41	Hukum Tata Negara Darurat <i>Emergency Constitutional Law</i>	Hukum Tata Negara Darurat mempelajari sejarah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang keadaan darurat negara, perkembangan undang-undang darurat, dan kajian terhadap keadaan darurat di Indonesia.
42	Hukum Pengawasan Pemerintahan <i>Government Supervision Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari asas-asas umum pemerintahan yang baik, teori pemerintahan, sejarah dan perkembangan pengawasan pemerintahan di Indonesia, dan system pengawasan pemerintahan.
43	Hukum Pemilu <i>Elections Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari pengetahuan teoretis tentang Pemilu serta pengetahuan hukum pemilu. Di dalam mata kuliah ini juga akan dikembangkan kemampuan analitis dan kemahiran mahasiswa dalam menganalisis persoalan pemilu dengan teori, prinsip negara hukum dan negara demokrasi, serta hukum positif.
44	Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi <i>Constitutional Law and Constitution Court</i>	Hukum konstitusi akan mempelajari konstitusi (UUD) sebagai objek peraturan perundang-undangan. Hukum Konstitusi dilihat dari segi peraturannya menjadi Hukum Konstitusi (Regulation of The Law of The Constitution) yang mengatur negara dari segi organisasinya. Dengan perkataan lain, Hukum Konstitusi adalah peraturan hukum yang menetapkan dan mengatur organisasi negara dari suatu negara dalam bentuk peraturan tertulis dan bentuk peraturan tidak tertulis.
45	Hukum Lingkungan <i>Environmental Law</i>	Mata kuliah ini merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya.
46	Hukum Pajak <i>Tax Law</i>	Mata kuliah ini memberikan gambaran pada mahasiswa bagaimana pengaturan pajak di Indonesia, tujuan pemerintah mengenakan pajak

		kepada warga Negara serta apa landasan pemerintah dalam pengenaan pajak baik secara sosiologis, filosofis serta yuridis. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan hukum pajak di Indonesia, prinsip-prinsip hukum pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pelaksanaan undang-undang pajak serta penyelesaian sengketa baik terkait subjek dan objek pajaknya dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, peneliti, akademisi maupun pejabat umum, juga implementasi keilmuan dalam bentuk produk-produk hukum berupa regulasi, akta otentik yang sesuai dengan undang-undang, kode etik serta peraturan lainnya yang terkait.
47	Sistem Peradilan Pidana <i>Criminal Justice System</i>	Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau teori-teori administrasi peradilan dan praktik peradilan pidana, tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan. Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan diruang peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
48	Pembaharuan Hukum Pidana <i>Criminal Law Reform</i>	Mata kuliah ini mempelajari teori-teori dasar dalam Hukum Pidana dan pembaharuannya serta pembaharuan Hukum Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
49	Kriminologi <i>Criminology</i>	Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke-19 bersamaan dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi yang merupakan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi timbulnya kejahatan serta mempelajari cara menanggulangi kejahatan. Dalam mata kuliah ini juga akan dipaparkan mengenai perkembangan kriminologi dari awal hingga kriminologi kontemporer. Mata kuliah direncanakan disajikan dalam 14 kali, dengan cara tatap muka, e-learning, dan metode lain yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.
50	Hukum Penitensier <i>Penitentiary Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum penitensier, lembaga pemidanaan, pidana dan pemidanaan, jenis-jenis pidana, grasi, abolisi dan amnesti, pengertian dan macam-macam remisi, pembinaan narapidana,

		dan disparitas pidana.
51	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Criminal Acts of Corruption and Money Laundering</i>	Mata kuliah ini merupakan matakuliah wajib peminatan Hukum Pidana. Matakuliah Tindak Pidana Korupsi membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, sejarah perkembangan Tindak Pidana Korupsi; hubungan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Nasional; asas-asas Tindak Pidana Korupsi; karakteristik Tindak Pidana Korupsi, macam-macam kejahatan Internasional dan mencari penyelesaiannya.
52	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan <i>Law of Child Protection and Women</i>	Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian perlindungan hukum, pengertian perlindungan anak, pengertian tentang anak dan hukum pidana anak, hakikat, wawasan, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, sistem peradilan anak, peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS), penjatuhan pidana anak, pembinaan, keadilan restoratif, diversifikasi dalam penanganan perkara anak, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.
53	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	Mata kuliah ini merupakan perpaduan antara dua disiplin hukum, yaitu hukum internasional dan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, sebelum mengulas lebih lanjut pengertian “hukum pidana” dan “hukum internasional”. Pemahaman terhadap pengertian kedua disiplin hukum tersebut mempermudah kita menarik benang merah dari hakekat pengertian hukum pidana internasional.
54	Perbandingan Hukum Pidana <i>Comparison of Constitutional Law</i>	Matakuliah ini pada dasarnya merupakan mata kuliah Wajib Program Kekhususan Perbandingan Hukum Pidana, mahasiswa diperkenalkan mengenai pengetahuan atau isu-isu yang paling mendasar (basic knowledge/basic issues) mengenai : pengertian Perbandingan Hukum Pidana, Tujuan dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Hukum Pidana, perbandingan hukum pidana dan penjelasannya, sistem hukum dan perbandingan hukum pidana di beberapa negara, asas-asas hukum pidana di beberapa negara, jenis-jenis pidana di beberapa negara, pemberatan dan pengurangan pidana di beberapa negara, keluarga hukum di dunia. Mahasiswa

		diharapkan mampu menguasai dan menjelaskan semua materi pembelajaran.
55	Hukum Orang dan Keluarga <i>Legal Person and Family</i>	Mata kuliah ini mempelajari hukum orang dan keluarga yang berisi asas, teori, konsep konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materil dalam ruanglingkup hukum keluarga khususnya hukum perkawinann menurut system hukum perdata.
56	Hukum Waris Perdata <i>Civil Inheritance Law</i>	Memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi peserta didik atas masalah-masalah kewarisan khususnya bagi golongan yang tunduk pada hukum perdata barat di Indonesia. Dalam hukum waris ini akan dijelaskan pewarisan karena undang-undang (ab intestato) maupun pewarisan karena wasiat, siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak atas waris, bagaimana pelaksanaannya, perhitungannya dan pengurusannya berdasarkan KUHPerdata.
57	Hukum Benda <i>Material Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum kebendaan, sistematika hukum benda, sumber dan perkembangan pengaturan hukum benda, eksistensi hukum kebendaan setelah berlakunya UUPA dan UUHT, sifat pengaturan hak benda dibandingkan dengan sifat pengaturan hukum perikatan, asas-asas hukum benda, macam kebendaan dalam hukum perdata berdasarkan KUH Perdata, macam kebendaan berdasarkan totalitas bendanya, macam kebendaan berdasarkan kepemilikannya, perbedaan hak kebendaan dengan hak perseroan, mengenai hak menguasai/ kedudukan berkuasa, hak milik, jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan dan hak kebendaan di atas benda milik orang seperti hak pakai (memungut) hasil dan hak pakai serta mendiami
58	Hukum Jaminan <i>Guarantee Law</i>	Mata kuliah ini mengkaji tentang sistem penjaminan dalam perjanjian kredit di perbankan, dimana mata kuliah ini akan membahas ketentuan tentang jenis jaminan, jaminan dengan sistem gadai, jaminan perorangan, jaminan dengan sistem Hypotik, jaminan dengan sistem Hak Tanggungan, dan jaminan Fidusia, serta bentuk

		perjanjian paripasu dan penjaminannya. Sehingga memberikan kepastian hukum terhadap para pihak terutama kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan atas pelunasan hutang debitur.
59	Hukum Keluarga Islam (hk perkawinan & waris islam) <i>Family Law (Islamic marriage law and inheritance)</i>	Mata kuliah ini mempelajari asas-asas hukum perkawinan, hukum keluarga dan hukum waris menurut hukum islam.
60	Hukum Perikatan Islam <i>Islamic Engangement Law</i>	Mata kuliah Hukum Perikatan Islam mencakup berbagai aspek dalam Hukum Perikatan, dari aspek teoritis, praktis maupun kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Mahasiswa mampu memahami lebih banyak tentang hukum Islam bidang perikatan. Walaupun bila dibandingkan dengan kitab fikih muamalah permasalahan yang dibahas tidak jauh berbeda, namun penekanan pada perikatan yang dikaitkan dengan hukum kontrak modern, yang dibahas dalam kacamata ilmu hukum, merupakan suatu nilai lebih dalam mata kuliah ini.
61	Hukum Perdata Internasional <i>International Civil Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum perdata Internasional, berkaitan dengan domisili, kewarganegaraan, perkawinan campuran, pemeliharaan anak, hukum perjanjian internasional, hukum ekonomi internasional dan arbitrase internasional. Termasuk juga didalamnya mengenai ketertiban umum, pilhan hukum, penyelundupan hukum dan perbuatan melawan hukum.
62	Perbandingan Hukum Perdata <i>Comparison of Civil Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tentang pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum, istilah dan pengertian perbandingan hukum perdata, sejarah singkat perbandingan hukum perdata, letak perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup di antara Ilmu Pengetahuan lainnya, macam-macam perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup perbandingan hukum perdata, kebutuhan yang mendorong membandingkan hukum (kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis), sebab adanya perbedaan dan persamaan di bidang hukum, fungsi perbandingan hukum, manfaat perbandingan hukum, proses perbandingan hukum, obyek perbandingan

		hukum, dasar dan peoman pokok dalam memproses perbandingan hukum, macam-macam metode perbandingan hukum di Dunia.
63	Hukum Perusahaan <i>Corporation Law</i>	Mata kuliah ini membahas mengenai badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, modal dan saham perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, badan hukum koperasi, badan hukum Yayasan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibilit, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
64	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional <i>Economic Law and International Business Transactions</i>	Mata kuliah ini mempelajari pengantar Hukum Ekonomi Internasional yang menyangkut definisi, istilah dan batasan Hukum Ekonomi Internasional, Sejarah Hukum Ekonomi Internasional yang mengkaji tahapan historis dan sejarah perkembangan Hukum Ekonomi Internasional, Subyek Hukum Ekonomi Internasional, Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Internasional, Sumber-sumber Hukum Ekonomi Internasional dan transaksi bisnis internasional
65	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment &amp; Capital Market Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari Hukum Pasar Modal di Indonesia, Dasar Hukum dan Teori-teori Hukum yang berkaitan dengan Kegiatan Pasar Modal, Instrumen-instrument dalam kegiatan bursa efek, Initial Public Offering (IPO) dalam kegiatan bursa efek, Independensi Badan Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan pasar modal, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Pasar Modal, Globalisasi dan Investa, Perizinan dan Pengembangan dalam Penanaman Modal Soal-soal Latihan/Tugas terkait dengan perbandingan dan perizinan, Penanaman Modal Asing dalam prespektif perbandingan, Tugas terkait 2 dengan penyelesaian sengketa direct invesment dan indirect investment dan Penyelesaian Sengketa Investasi dan Pasar Modal
66	Hukum Perbankan <i>Banking Law</i>	Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan memahami tentang Aspek-aspek Hukum dalam Sistem Keuangan Perbankan/Moneter, Perbankan Konvensional: Bank Umum dan BPR, Otoritas Pengawas Sistem Keuangan, Aspek-aspek Hukum Perkreditan, Surat-surat Berharga. Perbankan Syariah beserta Akad-akadnya, Lembaga Penjamin Simpanan,

		Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Rahasia Bank, Tindak Pidana Perbankan, Pencucian Uang, dan Likuidasi.
67	Hukum Asuransi <i>Assurance Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari pengertian asuransi, macam-macam usaha asuransi, perbedaan asuransi dan aktifitas lain, resiko penanggung. Resiko tertanggung, obyek-obyek pertanggungan, jenis-jenis resiko, polis asuransi, premi asuransi, kontrak perjanjian asuransi, dan kajian tentang pentingnya asuransi.
68	Hukum Kepailitan <i>Bankruptcy Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari pengertian-pengertian substantif dan ruang lingkup kepailitan, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar kepailitan yang sangat erat hubungannya dengan masalah dalam hukum perdata khususnya tentang hutang piutang, ruang lingkup dan prinsip dalam hukum kepailitan dan penundaan pembayaran dan aspek hukum terkait.
69	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana seharusnya mahasiswa memahami, menganalisis dan cakap untuk mendiskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen (HPK). Memahami latar belakang perlunya HPK serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Menganalisa klausul baku yang ada di masyarakat serta aspek-aspek didalamnya. Mengidentifikasi pengertian produk, product liability serta tanggungjawab produsen. Menjelaskan tugas dan tanggungjawab lembaga pemberdayaan konsumen serta menganalisa sengketa konsumen.
70	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>Antitrust Law and Unfair Business Competition</i>	Mata kuliah ini mempelajari pengertian monopoli, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian-perjanjian yang dilarang, kegiatan usaha yang dilarang, posisi dominan, penegakan hukum persaingan bisnis.
71	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Consular Law</i>	Mata kuliah ini merupakan matakuliah wajib peminatan Hukum Internasional. Matakuliah ini membahas tentang bentuk-bentuk hubungan diplomatik dan Fungsi-fungsi Diplomat, Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik,

		Pendirian Perwakilan Konsuler dan Fungsi-fungsi Perwakilan Konsuler, Fasilitas Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler.
72	Hukum Perjanjian Internasional <i>International Agreement Law</i>	Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ini memiliki kedudukan sebagai mata kuliah yang mendalami keberadaan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional. Mata kuliah hukum Perjanjian Internasional ini mengajarkan tentang dasar pengertian, tahapan pembuatan perjanjian internasional serta memahami pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional.
73	Hukum Perdagangan dan Keuangan Internasional <i>Law of International Trade &amp; Finance</i>	Mata kuliah ini mempelajari Teori dan Praktek dalam melaksanakan transaksi Bisnis Internasional melalui mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, sehingga Mhs diharapkan dapat menjadi Ilmuan yang menguasai baik teori maupun praktek dalam melakukan hubungan ekonomi internasional.
74	Hukum Udara dan Angkasa <i>Air and Space Law</i>	Mata kuliah ini menjelaskan norma norma hukum udara dan ruang angkasa, serta dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum udara yang terdapat dalam hukum internasional (Chicago C. 1944 dan amandemen-amandemennya, dan Annexes) dan Hukum Nasional (UU No. 1/2009) serta perundangan lainnya. Pemahaman hukum ruang angkasa (antariksa) yg terdapat dalam The Outer Space Treaty 1967, dan Konvensi-konvensi lainnya serta UU No 16 Tahun 2002)
75	Hukum Laut <i>Sea of Law</i>	Hukum Laut adalah Mata Kuliah yang membahas aspek-aspek hukum dari wilayah negara yang berupa laut. Mata kuliah ini mendiskusikan tentang berbagai zona maritim yang dikenal di dalam Hukum Laut Internasional, mulai dari Perairan Pedalaman ( <i>Internal Waters</i> ) sampai dengan Laut Lepas ( <i>High Seas</i> ). Selain pengaturan tentang zona-zona tersebut, hak-hak dan kewajiban negara-negara, terutama terkait dengan hak pelayaran dan hak kenelayanan pada berbagai zona maritim juga diberi porsi

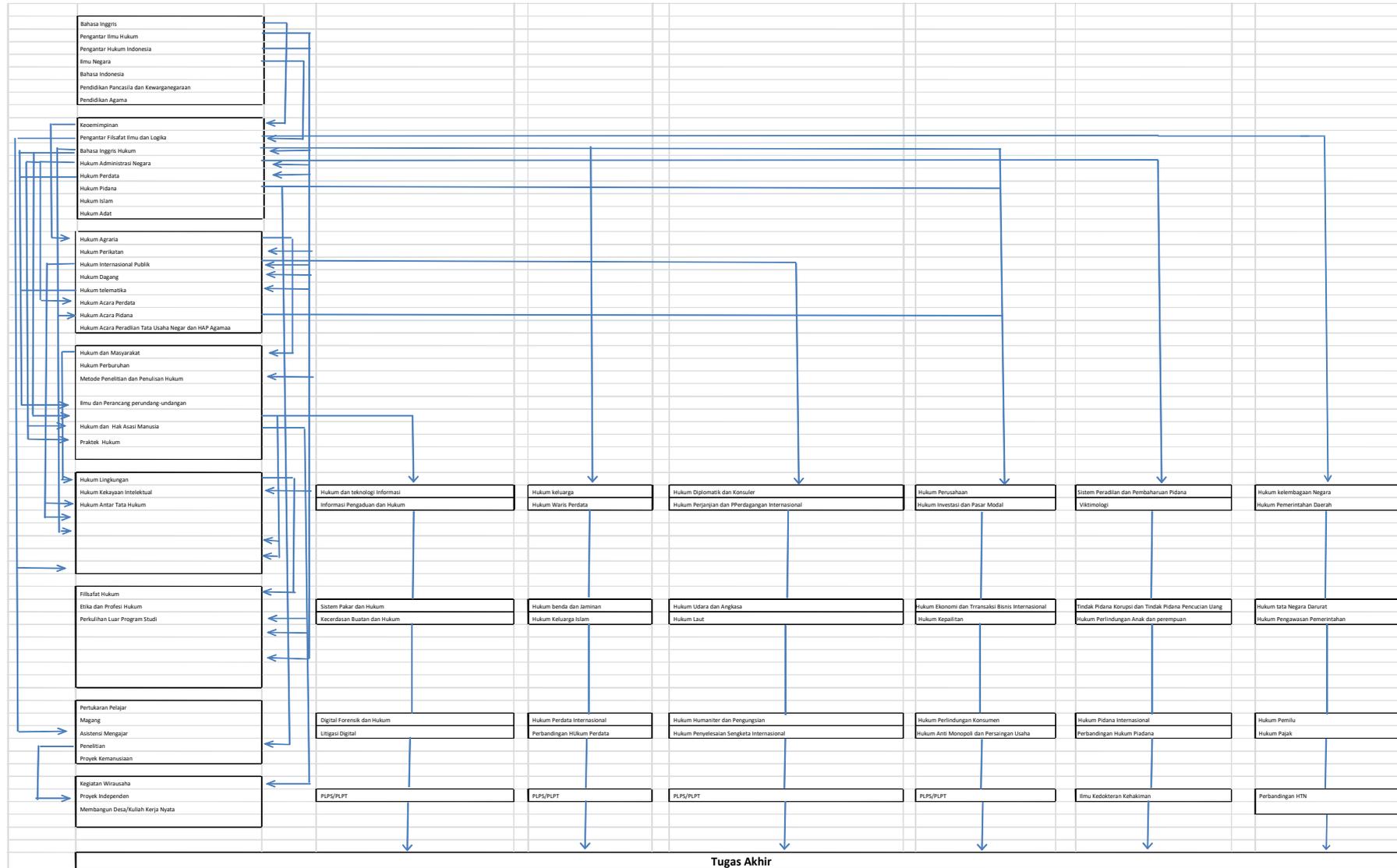
		pembahasan yang memadai. Beberapa pokok penting di dalam Hukum Laut Internasional juga dibahas, yakni tentang konsep Negara Kepulauan, Pencemaran Laut dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional
76	Hukum Humaniter <i>Humanitarian Law</i>	Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menguraikan terminologi dan latar belakang lahirnya hukum humaniter internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Sumber-sumber hukum yang berlaku dalam hukum humaniter, jenis-jenis konflik bersenjata, prinsip-prinsip dan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme penegakan hukum humaniter ketika terjadi pelanggaran dalam suatu konflik bersenjata internasional dan non-internasional.
77	Hukum Kepengungsian Internasional <i>Law of International Refugee</i>	Mata kuliah ini membahas tentang Jenis Jenis Pengungsi Internasional, yang meliputi: Economic Migrant (Migran Ekonomi), Refugees Sur Place (Pengungsi Sur Place), Statutory Refugees (Pengungsi Statuta), War Refugees (Pengungsi Perang), Mandate Refugee (Pengungsi Mandat), Statute Refugee (Pengungsi Konvensi), Internally Displaced Persons / IDPs (Pengungsi Dalam Negeri, Stateless Persons (Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan) dan mekanisme perlindungan internasional pengungsi, standar perlakuan penyelesaian masalah serta Penyelesaian akhir dan permanen bagi pengungsi internasional.
78	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>International Dispute Resolution Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari sistem penyelesaian permasalahan atau sengketa internasional yang efisien, efektif dan cepat, sehingga dapat memecahkan permasalahan ataupun sengketa hukum bisnis internasional
79	Hukum dan Teknologi Informasi <i>Law and Information Technology</i>	Mata kuliah ini mempelajari aspek hukum dalam pembuatan dan pemanfaatan teknologi informasi, kejahatan teknologi informasi, serta penyalahgunaan teknologi informasi.
81	Pemrosesan Gambar dan Hukum <i>Processing Image and Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari proses pengolahan gambar untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan citra dan visualisasi (photo editing, otomasi perkantoran, media, biometric, medis,

		dan entertainment) yang dikaitkan dengan kasus-kasus hukum tentang penyalahgunaan gambar untuk tindak kejahatan.
82	Kecerdasan Buatan dan Hukum <i>Artificial Intelligent and Law</i>	Mata kuliah ini memberikan dasar tentang kecerdasan buatan yang focus pada beberapa aplikasi kecerdasan buatan dan Teknik-teknik penyelesaiannya (soft computing) yang dikaitkan dengan kasus hukum penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk memanipulasi data/tindak kejahatan.
83	Hukum komunikasi dan multimedia <i>Communication and Multimedia Law</i>	Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pemanfaatan aplikasi komunikasi multimedia untuk menunjang kegiatan public relation (interaksi 2 arah) sesuai dengan karakteristik pesan, media yang digunakan, dan target audiens melalui media cyber yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi dalam hukum bisnis.
84	Informasi Pengaduan dan Hukum <i>Retrieval Information and Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari tata kelola proses informasi digital baik melalui aplikasi maupun media social sebagai dasar pengaduan adanya tindakan melanggar hukum.
85	Digital Forensik dan Hukum <i>Digital Forensic and Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari forensic dalam ilmu criminal dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pengungkapan suatu kejahatan melalui pengungkapan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kemajuan jaman, berbagai tindakan kejahatan dan kriminal moderen dewasa ini melibatkan secara langsung maupun tidak langsung teknologi informasi dan komunikasi.
86	Sistem Pakar dan Hukum <i>Expert System and Law</i>	Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar system pakar dan aspek hukum dengan menggunakan predicate calculus, prototitional logic, system berbasis aturan, semantic network dan frame, serta representasi pengetahuan dengan menggunakan fuzzy dan jaringan syaraf tiruan yang dihubungkan dengan pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus hukum.
87	Litigasi Elektronik <i>E-litigation</i>	Mata kuliah ini mempelajari system elektronik yang digunakan di pengadilan untuk praktek beracara dengan media elektronik
88	Pertukaran Pelajar <i>Student Exchange</i>	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc).

89	Magang <i>Internship</i>	Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah), Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim, Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
90	Asistensi Mengajar <i>Teaching Assistance</i>	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
91	Penelitian <i>Research</i>	Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana, Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.
92	Proyek Kemanusiaan <i>Humanity Project</i>	Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
93	Kegiatan Wirausaha <i>Entrepreneurship</i>	Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang),  Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal, Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.
94	Proyek Independen <i>Independent Project</i>	Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana, menghasilkan dampak yang nyata di akhir

		kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
95	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik <i>Building a Village / Thematic Real Work Lecture</i>	Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).
96	Sertifikasi Penyusunan Bahan Hukum <i>Legal Drafting Certification</i>	Program pelatihan bersertifikat dengan materi penyusunan bahan hukum untuk kepentingan litigasi dan non litigasi.
97	Sertifikasi Paralegal <i>Paralegal Certification</i>	Program pelatihan bersertifikat dengan materi praktek administrasi beracara dan bantuan hukum di pengadilan
98	Sertifikasi Mediasi <i>Mediation Certification</i>	Program pelatihan bersertifikat dengan materi praktek penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi.
99	Sertifikasi Presentasi dihadapan Publik <i>Public Speaking Certification</i>	Program pelatihan bersertifikat dengan materi praktek presentasi dalam seminar.
100	Sertifikasi IELTS/Toefl <i>IELTS/Toefl Certification</i>	Program pelatihan Bahasa Inggris bersertifikat IELTS/Toefl bekerjasama dengan Lembaga Bahasa bereputasi.
101	Sertifikasi Literasi Teknologi Informasi <i>Literacy Information Technology Certification</i>	Program pelatihan bersertifikat dengan materi praktek literasi melalui media informasi teknologi.
102	Sertifikasi Kewirausahaan <i>Entrepreneurship Certification</i>	Program pelatihan bersertifikat dengan materi praktek kewirausahaan.
103	Tugas Akhir *) <i>Law of Bachelor Thesis</i>	Tugas akhir merupakan mata kuliah wajib dalam bentuk karya ilmiah hasil penelitian mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi.

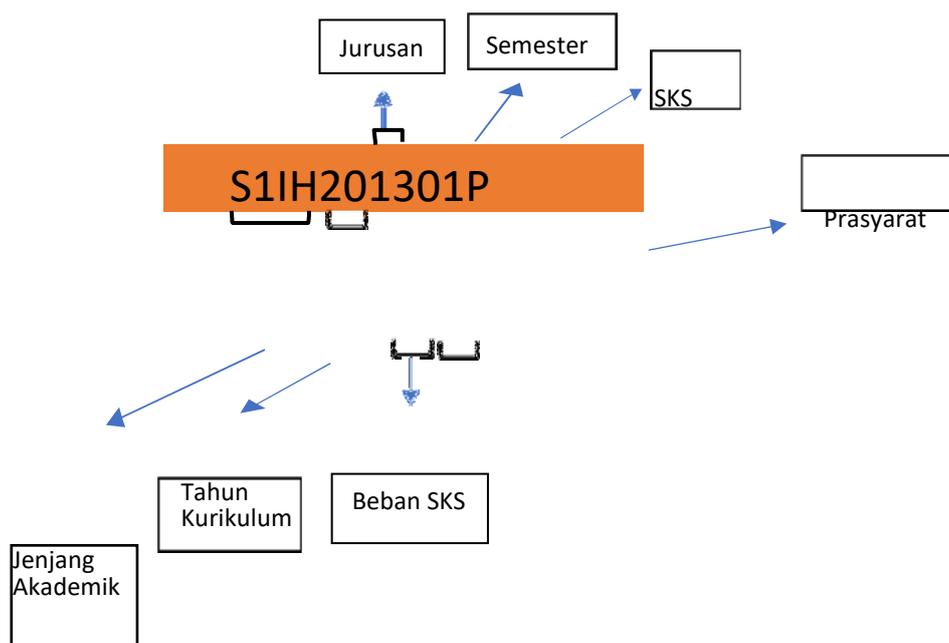
## 6. Peta Kurikulum





## 7. Pengkodean Mata Kuliah

Kode mata kuliah terdiri 14 (empat belas) karakter alfanumerik yang terdiri atas tiga huruf di awal menjelaskan kode mata kuliah sesuai dengan kelompok kompetensi matakuliah. Digit ke-4 dan ke-5 menunjukkan jenjang Pendidikan. Digit ke-6 dan ke-7 menunjukkan Nama Program Studi. Digit ke-8 dan ke-9 menunjukkan Tahun Kurikulum. Digit ke-10 menunjukkan Semester. Digit ke-11 menunjukkan jumlah SKS. Digit ke-12 dan ke-13 menunjukkan nomer Urut mata kuliah dan Digit ke 14 menunjukkan mata kuliah Prasyarat. Berikut contoh cara membaca kode mata kuliah:



**Tabel Nama Program Studi, Jenjang dan Singkatan**

Nama Prodi	Singkatan	Jenjang	Singkatan
Ilmu Hukum	IH	Sarjana	S1

**Tabel Besaran SKS**

Besaran SKS
1

**Tabel Jenis Mata Kuliah Prasyarat**

Nama	Kode
Prasyarat	P

2
3
4

Tidak Bersyarat	N
-----------------	---

### Tabel Tahun Kurikulum

Tahun	Dua Digit Terakhir
2020	20

### Tabel Semester

Semester	Kode
Ganjil	1
Genap	2

### Tabel Urut Penomoran Mata Kuliah

Urut Penomoran	
01	
02	
...dst	

## 8. Sebaran Mata Kuliah

Mata kuliah didistribusikan dalam 8 (delapan) semester, terdiri dari:

- a. Semester 1 – 3 : MKWU dan Mata Kuliah Wajib Fakultas/Prodi;
- b. Semester 4 – 5 : Mata Kuliah Wajib Fakultas/Prodi dan Mata Kuliah Wajib Konsentrasi;
- c. Semester 6 : Program Kampus Merdeka
- d. Semester 7-8 : Program Sertifikasi dan Tugas Akhir

Distribusi mata kuliah berdasarkan konsentrasi peminatan per-semester dilengkapi keterangan mata kuliah sebagai prasyarat dengan nilai minimal adalah C, sebagai berikut:

SEMESTER I		
KODE MK	MATA KULIAH	SKS
MKWU120101	Pendidikan Agama	2
MKWU120102	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3

MKWU120103	Bahasa Indonesia	2
MKWU120104	Pendidikan Bela Negara	2
HKM120101	Bahasa Inggris	3
HKM120102	Pengantar Ilmu Hukum	3
HKM120103	Pengantar Hukum Indonesia	3
HKM120104	Ilmu Negara	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>

SEMESTER II		
KODE MK	MATA KULIAH	SKS
MKWU120205	Kepemimpinan	2
MKWU120206	Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika	2
HKM120205	Bahasa Inggris Hukum	2
HKM120206	Hukum Tata Negara	3
HKM120207	Hukum Administrasi Negara	3
HKM120208	Hukum Perdata	3
HKM120209	Hukum Pidana	3
HKM120210	Hukum Islam	2
HKM120211	Hukum Adat	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>

SEMESTER III		
KODE MK	MATA KULIAH	SKS
HKM120312	Hukum Agraria	3
HKM120313	Hukum Perikatan	2
HKM120314	Hukum Internasional Publik	3

HKM120315	Hukum Dagang	2
HKM120316	Hukum Telematika	3
HKM120317	Hukum Acara Perdata	3
HKM120318	Hukum Acara Pidana	3
HKM120319	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
HKM120320	Hukum Acara Peradilan Agama	2
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>

SEMESTER IV				
KODE MK	MATA KULIAH	SKS		KET
HKM120421	Hukum dan Masyarakat		2	
HKM120422	Hukum Perburuhan		2	
HKM120423	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum		3	
HKM120424	Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan		2	
HKM120425	Hukum dan Hak Asasi Manusia		2	
HKM120426	Praktek Hukum		6	17
<b>KONSENTRASI</b>			4	
<b>HTN &amp; HAN</b>				
HKM120427	Hukum Kelembagaan Negara <i>Institutional State Law</i>	2		
HKM120428	Hukum Pemerintahan Daerah	2		
<b>HUKUM PIDANA</b>				
HKM120429	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana <i>Justice System and Criminal Reform</i>	2		
HKM120430	Kriminologi <i>Criminology</i>	2		

HUKUM PERDATA				
HKM120431	Hukum Keluarga <i>Family Law</i>	2		
HKM120432	Hukum Waris Perdata <i>Civil Inheritance Law</i>	2		
HUKUM & BISNIS				
HKM120433	Hukum Perusahaan <i>Corporation Law</i>	2		
HKM120434	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment &amp; Capital Market Law</i> Hukum	2		
HUKUM INTERNASIONAL				
HKM120435	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Consular Law</i>	2		
HKM120436	Hukum Perjanjian dan Perdagangan Internasional <i>International Agreement and Trade Law</i>	2		
HUKUM & TEKNOLOGI INFORMASI				
HKM120437	Hukum dan Teknologi Informasi <i>Law and Information Technology</i>	2		
HKM120438	Informasi Pengaduan dan Hukum <i>Retrieval</i> <i>Information and Law</i>	2		
<b>JUMLAH</b>			<b>21</b>	

SEMESTER V				
KODE MK	MATA KULIAH	SKS		KET
HKM120539	Hukum Lingkungan <i>Environmental Law</i>		2	
HKM120540	Hak Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Rights</i>		2	
HKM120541	Hukum Antar Tata Hukum		2	

KONSENTRASI			4	
HTN & HAN				
HKM120542	Hukum Tata Negara Darurat <i>Emergency Constitutional Law</i>	2		
HKM120543	Hukum Pengawasan Pemerintahan <i>Government Supervision Law</i>	2		
HUKUM PIDANA				
HKM120544	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Criminal Acts of Corruption and Money Laundering</i>	2		
HKM120545	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan <i>Law of Child Protection and Women</i>	2		
HUKUM PERDATA				
HKM120546	Hukum Benda dan Jaminan <i>Material Law</i>	2		
HKM120547	Hukum Keluarga Islam (hukum perkawinan & waris islam) <i>Family Law (Islamic marriage law and inheritance)</i>	2		
HUKUM & BISNIS				
HKM120548	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional <i>Economic Law and International Business Transactions</i>	2		
HKM120549	Hukum Kepailitan <i>Bankruptcy Law</i>	2		
HUKUM INTERNASIONAL				
HKM120550	Hukum Udara dan Angkasa <i>Air and Space Law</i>	2		
HKM120551	Hukum Laut <i>Sea of Law</i>	2		

HUKUM & TEKNOLOGI INFORMASI				
HKM120552	Sistem Pakar dan Hukum <i>Expert System and Law</i>	2		
HKM120553	Kecerdasan Buatan dan Hukum <i>Artificial Intelligent and Law</i>	2		
MATA KULIAH PILIHAN**) )			11	PLPS
	Mata kuliah dipilih dapat dipilih dari mata kuliah yg ditawarkan oleh program studi didalam universitas dan dapat juga diluar Universitas			
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>	

SEMESTER VI				
KODE MK	MATA KULIAH	SKS		KET
HKM120654	Filsafat Hukum*) <i>Philosophy Law</i>		2	
HKM120655	Etika dan Profesi Hukum <i>Legal Professional Ethics</i>		2	
KONSENTRASI			4	
HTN & HAN				
HKM120656	Hukum Pemilu <i>Elections Law</i>	2		
HKM120657	Hukum Pajak <i>Tax Law</i>	2		
HUKUM PIDANA				
HKM120658	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2		
HKM120659	Perbandingan Hukum Pidana <i>Comparison of Contitutional Law</i>	2		
HUKUM PERDATA				

HKM120660	Hukum Perdata Internasional <i>International Civil Law</i>	2		
HKM120661	Perbandingan Hukum Perdata <i>Comparison of Civil Law</i>	2		
<b>HUKUM &amp; BISNIS</b>				
HKM120662	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2		
HKM120663	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>Antitrust Law and Unfair Business Competition</i>	2		
<b>HUKUM INTERNASIONAL</b>				
HKM120664	Hukum Humaniter dan Kepengungsian <i>Humanitarian and Refugees Law</i>	2		
HKM120665	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>International Dispute Resolution Law</i>	2		
<b>HUKUM &amp; TEKNOLOGI INFORMASI</b>				
HKM120666	Digital Forensik dan Hukum <i>Digital Forensic and Law</i>	2		
HKM120667	Litigasi Elektronik <i>E-litigation</i>	2		
<b>MATA KULIAH PILIHAN</b>			<b>9</b>	<b>PLPS</b>
	Mata kuliah dipilih dapat dipilih dari mata kuliah yg ditawarkan oleh program studi didalam universitas dan dapat juga diluar Universitas			
<b>JUMLAH</b>			<b>17</b>	
<b>SEMESTER VII</b>				
<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>		
HKM120768	Pertukaran Pelajar/ <i>Student Exchange</i>	20		
HKM120769	Magang/ <i>Internship</i>			
HKM120770	Asistensi Mengajar/ <i>Teaching Assistant</i>			

HKM120771	Penelitian/ <i>Research</i>
HKM120772	Proyek Kemanusiaan/ <i>Humanitarian Project</i>
HKM120773	Kegiatan Wirausaha/ <i>Entrepreneur Activity</i>
HKM120774	Proyek Independen/ <i>Independent Project</i>
HKM120775	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik/ <i>Building a Village/ Thematic Real/Work Lecture</i>

SEMESTER VIII			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
HKM120876	Tugas Akhir*)	4	Telah menempuh 90 SKS

\*)Dapat diambil di semester ganjil dan genap.

\*\*\*)Mata kuliah pilihan yang diambil diluar prodi S1 Hukum UPNVJ.

## 9. Beban SKS dan Lama Studi

Beban Studi ditetapkan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS), dengan beban studi 150 SKS. Distribusi SKS dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut:

NO	KELOMPOK MATA KULIAH	BEBAN KREDIT (SKS) PROGRAM KONSENTRASI					
		I	II	III	IV	V	VI
1	MK. Wajib Universitas	13	13	13	13	13	13
2	MK. Wajib Program Studi	85	85	85	85	85	85
3	MK. Wajib Program Konsentrasi (PK)	12	12	12	12	12	12
4	MK. PLPS	20	20	20	20	20	20
5	MK. PLU	20	20	20	20	20	20
	JUMLAH	150	150	150	150	150	150

SKS LULUS						Indeks Prestasi Minimal	Lama studi Maksimum
MKWU	MKW Fakultas/P rodi	MKW Kon-sentrasi	Mata Kuliah Pilihan Kampus Merdeka	Sertiifikasi	Total		
<b>13</b>	<b>85</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2.75</b>	<b>14 Semester (14 tahun)</b>

## 10. Ekuivalensi Matakuliah

Ekuivalensi matakuliah merupakan proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih matakuliah. Adapun ekuivalensi matakuliah dari kurikulum lama dengan kurikulum 2020 adalah sebagai berikut:

### 1) Matakuliah Wajib Universitas

No	2016			2020			Ketr
	klp MTK	Mata Kuliah	SKS	Kode MTK	MTK	SKS	
1	MPK 0009	Bahasa Indonesia	3	MKWU120103	Bahasa Indonesia	2	
2	MPK 0011	Pendidikan Pancasila	2	MKWU120102	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	
3	MPK 0010	Pendidikan Agama	3	MKWU120101	Pendidikan Agama	2	
4	MPK 0008	Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	2	MKWU120104	Pendidikan Bela Negara	2	
5	MPK 0012	Kepemimpinan	3	MKWU120205	Kepemimpinan	2	
6	MBB 0002	Kewirausahaan	2	MB	PLPS dan PLPT	2	
				MB	Kegiatan wirausaha	2	
				HKM120769	Magang	2	
				MB	Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa	2	

7	MBB 0003	Pendidikan Kewarganegaraan	3	MKWU120102	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	
8	MPK 0001	Bahasa Inggris 1	2	HKM120101	Bahasa Inggris	3	
9	MPK 0002	Bahasa Inggris 2	2	HKM120101	Bahasa Inggris	3	

## 2) Matakuliah Wajib Program Studi

No	Kurikulum 2016			Kurikulum 2020			Ketr
	klp MTK	Mata Kuliah	SKS	Kode MTK	MTK	SKS	
1	MPK 0003	Bahasa Inggris 3	1	HKM120101	Bahasa Inggris	3	
2	MPK 0004	Bahasa Inggris 4	1	HKM120101	Bahasa Inggris	3	
3	MPK 0005	Bahasa Inggris 5	1	HKM120101	Bahasa Inggris	3	
4	MBB 0004	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	4	HKM120102	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	3	
5	MBB 0005	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	2	HKM120103	Pengantar Hukum Indonesia	3	
6	MBB 0006	Ilmu Negara	3	HKM120104	Ilmu Negara	3	
7	MBB 0007	Hukum Tata Negara	3	HKM120206	Hukum Tata Negara	3	
8	MBB 0009	Hukum Perdata	4	HKM120208	Hukum Perdata	3	
9	MBB 0010	Hukum Pidana 1	3	HKM120209	Hukum Pidana	3	
10	MBB 0016	Hukum Islam	2	HKM120210	Hukum Islam	2	
					Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
					Magang	2	
11	MBB 0017	Hukum Administrasi Negara	3	HKM120207	Hukum Administrasi Negara	3	
12			3	HKM120539	Hukum Lingkungan	2	

	MBB 0008	Hukum Lingkungan		MB	Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
13	MBB 0012	Hukum Internasional	3	HKM120314	Hukum Internasional Publik	3	
14	MBB 0013	Hukum Agraria	3	HKM120312	Hukum Agraria	3	
15	MBB 0015	Hukum Adat	2	MBB 0015	Hukum Adat	2	
				MB	Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
16	MBB 0011	Hukum Pidana 2	2	MB	Penelitian	2	
17	MBB 0014	Hukum Dagang	3	HKM120315	Hukum Dagang	2	
18	MBB 0024	Sosiologi Hukum	2	HKM120421	Hukum dan Masyarakat	2	
19	MBB 0023	Hukum Perburuhan	2	HKM120422	Hukum Perburuhan	2	
20	MBB 0018	Hukum Waris	2	HKM120432	Hukum Waris Perdata	2	
21	MKB 0029	Hukum Acara Perdata	3	HKM120317	Hukum Acara Perdata	3	
22	MKB 0030	Hukum Acara Pidana	3	HKM120318	Hukum Acara Pidana	3	
23	MBB 0025	Hukum Militer	2	HKM120550	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	
					Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
					Magang	2	
24	MKK 0013	Statistik	2	MB	PLPS/PLPT		
25	MKK 0015	Hukum Perikatan	2	HKM120313	Hukum Perikatan	2	
26	MBB 0019	Hukum Antar Tata Hukum	2	HKM120541	Hukum Antar Tata Hukum	2	
27	MBB 0026	Hukum Udara & Ruang Angkasa	2	HKM120550	Hukum Udara & Ruang Angkasa	2	

28	MBB 0027	Hukum Laut	2	HKM120551	Hukum Laut	2	
29	MKK 0007	Perancangan Kontrak	2	HKM120426	Magang	2	
30	MKK 0004	Peradilan Perdata*)	2	MB	Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
				HKM120426	Praktek Hukum	6	
				HKM120769	Magang	2	
				HKM120667	Litigasi Elektronik	2	
31	MKK 0011	Lab. Peradilan Perdata*)	1	HKM120426	Magang	2	
				HKM120667	Litigasi Elektronik	2	
32	MKB 0031	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	HKM120426	Praktek Hukum	6	
				HKM120426	Magang	2	
				HKM120769	Litigasi Elektronik	2	
				MB	Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
33	MKB 0033	Hukum Acara Peradilan TUN	2	HKM120319	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	
34	MBB 0028	Hukum Humaniter	2	HKM120664	Hukum Humaniter dan Kepengungsian	2	
35	MKK 0005	Peradilan Pidana*)	2	HKM120426	Praktek Hukum	6	
				HKM120667	Litigasi Elektronik	2	
36	MKK 0012	Lab. Peradilan Pidana*)	1	HKM120426	Praktek Hukum	6	
				HKM120426	Magang	2	
				HKM120769	Litigasi Elektronik	2	
37	MKK 0006	Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan	2	HKM120665	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2	
38	MPB 0001	Pengantar Filsafat Hukum	2	HKM120654	Filsafat Hukum	2	
39	MKK 0001	Metode Penelitian Hukum	2	HKM120423	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	
				MB	Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	

40	MKK 0002	Penulisan Hukum	2	HKM120423	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	
					Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
41	MBB 0022	Cyber Law	2	HKM120316	Hukum Telematika	3	
				MB	Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
42	MPB 0002	Etika Profesi Hukum	2	HKM120655	Etika dan Profesi Hukum	2	
43	MKK 0008	Perancangan Perundang-Undangan	2	HKM120424	Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan	2	
44	MBB 0001	Magang/KKN**)	2	HKM120769	Magang	2	
45	MKB 0032	Hukum Acara Peradilan Agama	2	HKM120320	Hukum Acara Peradilan Agama	2	
46	MKK 0003	Penyidikan dan Penuntutan	2	HKM120544	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	2	
47	MKK 0014	Skripsi	4	HKM120876	Tugas Akhir	4	

### 3) Matakuliah Wajib Peminatan

No							Ketr
	klp MTK	Mata Kuliah	SKS	Kode MTK	MTK	SKS	
<b>MK Wajib Peminatan Hukum Perdata</b>							
1	MKB 0005	Hukum Jaminan	2	HKM120546	Hukum Benda dan Jaminan	2	
				HKM120432	Hukum Waris Perdata	2	
2	MKB 0001	Hukum Perorangan dan Perkawinan	2	HKM120547	Hukum Keluarga Islam (hukum perkawinan & waris islam)	2	
3	MKB 0004	Hukum Benda	2	HKM120546	Hukum Benda dan Jaminan	2	
				HKM120431	Hukum Keluarga	2	

4	MKB 0011	Zakat dan Wakaf	2	HKM120547	Hukum Keluarga Islam (hukum perkawinan & waris islam)	2	
				HKM120431	Hukum Keluarga	2	
5	MKB 0047	Hukum Perikatan Islam	2	HKM120547	Hukum Keluarga Islam (hukum perkawinan & waris islam)	2	
				HKM120431	Hukum Keluarga	2	
6	MBB 0021	Perbandingan Hukum Perdata	2	HKM120661	Perbandingan Hukum Perdata	2	
7	MBB 0020	Kapita Selekt Hukum Perdata	2	HKM120660	Hukum Perdata Internasional	2	
<b>MK Wajib Peminatan Hukum Internasional</b>							
1	MKB 0035	Hukum Ekonomi Internasional	2	HKM120548	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional	2	Pemin atan Huku m Bisnis
2	MKB 0036	Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Internasional	2	HKM120665	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2	
3	MKB 0037	Hukum Perjanjian Internasional	2	HKM120436	Hukum Perjanjian dan Perdagangan Internasional	2	
4	MKB 0034	Hukum Perdata Internasional	2	HKM120436	Hukum Perdata Internasional	2	Pemin atan Huku m Perdat a
5	MKB 0039	Hukum Pengungsi Internasional	2	HKM120664	Hukum Humaniter dan Kepengungsian	2	
6	MKB 0038	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	HKM120435	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	
7	MKB 0040	Hukum Organisasi Internasional	2	HKM120664	Hukum Humaniter dan Kepengungsian	2	
<b>MK Wajib Peminatan Hukum Bisnis</b>							
1	MKB 0015	Hukum Persaingan Usaha	2	HKM120663	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2	

2	MKB 0016	Hukum Pajak	2	HKM120657	Hukum Pajak	2	
3	MKB 0017	Hukum Investasi	2	HKM120434	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	
				HKM120433	Hukum Perusahaan	2	
4	MKB 0018	Hukum Pasar Modal	2	HKM120434	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	
				HKM120433	Hukum Perusahaan	2	
5	MKB 0019	Hukum Perlindungan Konsumen	2	HKM120662	Hukum Perlindungan Konsumen	2	
6	MKB 0020	Hak Atas Kekayaan Intelektual	2	HKM120540	Hak Kekayaan Intelektual	2	
7	MKB 0021	Legal Audit	2	HKM120433	Hukum Perusahaan	2	
8	MKB 0009	Hukum Perbankan	2	HKM120433	Hukum Perusahaan	2	
				HKM120769	Magang	2	
9	MKB 0056	Pengantar Hukum Bisnis	2	HKM120315	Hukum Dagang	2	
<b>MK Wajib Peminatan Hukum Tata Negara (HTN)</b>							
1	MKB 0008	Hukum Konstitusi	2	HKM120427	Hukum Kelembagaan Negara	2	
2	MKB 0010	Hukum dan Politik	2	HKM120656	Hukum Pemilu	2	
3	MKB 0044	Hukum Hukum Kelembagaan Negara	2	HKM120427	Hukum Kelembagaan Negara	2	
4	MKB 0045	Hukum Pemerintahan Daerah	2	HKM120428	Hukum Pemerintahan Daerah	2	
5	MKB 0046	Kapita Selekt HTN	2	HKM120542	Hukum Tata Negara Darurat	2	
6	MKB 0048	Sistem Pemerintahan Indonesia	2	HKM120543	Hukum Pengawasan Pemerintahan	2	
7	MKB 0049	Perbandingan HTN	2	HKM120542	Hukum Tata Negara Darurat	2	

MK Wajib Hukum Pidana							
1	MKB 0022	Kriminologi	2	HKM120430	Kriminologi	2	
2	MKB 0023	Hukum Perlindungan Anak	2	HKM120545	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2	
3	MKB 0024	Tindak Pidana Korupsi	2	HKM120544	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	2	
4	MKB 0025	Viktimologi	2	HKM120429	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana	2	
				HKM120659	Perbandingan Hukum Pidana	2	
				MB	Penelitian dengan luaran artikel terpublikasi	2	
5	MKB 0026	Hukum Pidana Internasional	2	HKM120658	Hukum Pidana Internasional	2	
6	MKB 0027	Ilmu Kedokteran Kehakiman	2	HKM120429	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana	2	
7	MKB 0028	Hukum Pidana Ekonomi	2	HKM120659	Perbandingan Hukum Pidana	2	
MK Wajib Peminatan Praktisi							
1	MKB 0050	Hukum Acara Peradilan Niaga	2	HKM120549	Hukum Kepailitan	2	
2	MKB 0002	Praktek Peradilan Niaga	2	HKM120426	Praktek Hukum	6	
3	MKB 0014	Praktek Mahkamah Konstitusi	2	HKM120426	Praktek Hukum	6	
4	MKB 0051	Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial	2	HKM120662	Hukum Perlindungan Konsumen	2	
				HKM120665	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2	
5	MKB 0013	Praktek Peradilan Agama	2	HKM120426	Praktek Hukum	6	
6	MKB 0006	Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Konsumen	2	HKM120662	Hukum Perlindungan Konsumen	2	
7	MKB 0007	Legal Opinion	2	HKM120437	Informasi Pengaduan dan Hukum	2	

Ekuivalensi matakuliah selain dari tabel di atas, dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## BAB IV

### PELAKSANAAN KURIKULUM

#### 1. Standar Kompetensi Minimal Dosen

Standar kompetensi minimal dan metode pembelajaran setiap mata kuliah, dijelaskan dalam tabel berikut ini:

<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>Standar Kompetensi Minimal Dosen Pengampu</b>	<b>Metode Pembelajaran</b>	<b>Kebutuhan Sarana/Prasarana</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Min S-2</li><li>- Min Jab. Akademik AA</li></ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"><li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li><li>- Infocus</li><li>- Laptop/PC</li></ul>
	Pendidikan Agama	<ul style="list-style-type: none"><li>- Min S-2</li><li>- Min Jab. Akademik AA</li></ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"><li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li><li>- Infocus</li><li>- Laptop/PC</li></ul>
	Bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Min S-2</li><li>- Min Jab. Akademik AA</li></ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"><li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li><li>- Infocus</li><li>- Laptop/PC</li></ul>
	Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Min S-2</li><li>- Min Jab. Akademik AA</li></ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"><li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li><li>- Infocus</li><li>- Laptop/PC</li></ul>
	Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Min S-2</li><li>- Memiliki rekognisi memimpin di industri/instansi pemerintah (BUMN)</li><li>- Min Jab. Akademik AA</li></ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"><li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li><li>- Infocus</li><li>- Laptop/PC</li></ul>

	Filsafat Ilmu dan Logika Penalaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-3</li> <li>- Min Jab. Akademik Lektor</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Ilmu Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Pengantar Ilmu Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Pengantar Hukum Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Sistem Hukum Dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Sosiologi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Tata Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>

	Hukum Administrasi Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perikatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Telematika (Cyber Law)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan (Legislative Drafting)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Acara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Acara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>

	Filsafat Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Etika dan Profesi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Peradilan Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus/Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Peradilan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus/Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus/Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus/Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Dagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Penyusunan Dokumen Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Study kasus/Praktik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Reading/Listening /Writing/Conversation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Bahasa Inggris Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Reading/Listening /Writing/Conversation/Case Study	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>

	Bahasa Inggris untuk Penulisan Akademik dan Presentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Writing/Presentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Kelembagaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Tata Negara Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Pengawasan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Pidana Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Sistem Peradilan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platform PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>

	Perbandingan Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Pembaharuan Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Penitensier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Kriminologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Orang dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Waris Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Benda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perikatan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>

	Hukum Keluarga Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perdata Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>Laptop/PC</li> </ul>
	Perbandingan Hukum Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Kepailitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Investasi dan Pasar Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>- Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> <li>Laptop/PC</li> </ul>

	Hukum Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Humaniter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perjanjian Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Perdagangan dan Keuangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Diplomatik dan Konsuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Udara dan Angkasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum Kepengungsian Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Digital Forensik dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus</li> </ul>

				Laptop/PC
	Pemrosesan Gambar dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Informasi Pengaduan dan Hukum Retrieval Information and Law	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Sistem Pakar dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Kecerdasan Buatan dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum komunikasi dan multimedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Hukum dan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Litigasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Sertifikasi Penyusunan Bahan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Rekognisi sebagai praktisi hukum</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Sertifikasi Paralegal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Rekognisi sebagai praktisi hukum</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>

	Sertifikasi Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Rekognisi sebagai praktisi hukum</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Sertifikasi Presentasi dihadapan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Rekognisi sebagai praktisi public speaking</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Sertifikasi IELTS/Toefl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga bersertifikat</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Sertifikasi Literasi Informasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Rekognisi sebagai praktisi bidang IT</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Sertifikasi Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Rekognisi sebagai wirausahawan</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>
	Tugas Akhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Min S-2</li> <li>- Min Jab. Akademik AA</li> </ul>	Diskusi/Role model/Study kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LAN/Wifi/Platfom PJJ berbayar</li> <li>- Infocus Laptop/PC</li> </ul>

## 2. Pendekatan Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran disampaikan dengan bermacam-macam metode, yang dijelaskan dalam table berikut:

No	Model Pembelajaran	Yang Dilakukan Dosen	Yang Dilakukan Mahasiswa	Kemampuan Yang Diperoleh Mahasiswa
1	<i>Small Group Discussion</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi.</li> <li>2) Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir sesi diskusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk kelompok (5-10 orang).</li> <li>2) Memilih bahan diskusi.</li> <li>3) Mepresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas.</li> </ol>	Komunikasi Kerjasama Sintesa hasil Saling menghargai Inisiatif Kepemimpinan
2	<i>Role-Play &amp; Simulation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merancang situasi atau kegiatan yang mirip dengan sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model, dan komputer.</li> <li>2) Membahas kinerja mahasiswa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan.</li> <li>2) Mempraktekan atau mencoba berbagai model yang telah disiapkan (komputer, propotype, dll).</li> </ol>	Apresiasi Analogi/imajinasi Empati Kreativitas Pengalaman Trampil
3	<i>Discovery Learning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan data atau metode untuk menelusuri pengetahuan yang akan dipelajari mahasiswa.</li> <li>2) Memeriksa dan memberikan ulasan terhadap hasil belajar mahasiswa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.</li> <li>2) Mempresentasikan secara verbal dan non verbal.</li> </ol>	Kreatif Inovasi Analisis Inisiatif Menyenangkan
4	<i>Self-Directed Learning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa.</li> <li>2) Memberikan arahan, bimbingan dan umpan balik kemajuan belajar mahasiswa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.</li> <li>2) Inisiatif belajar dari mahasiswa sendiri.</li> </ol>	Kemandirian Kreatif Bertanggung jawab Percaya diri Ketekunan

5	<i>Cooperative Learning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merancang dan memonitor proses belajar mahasiswa.</li> <li>2) Menyiapkan kasus atau masalah untuk diselesaikan mahasiswa secara berkelompok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membahas dan menyimpulkan masalah atau tugas yang diberikan dosen secara berkelompok.</li> <li>2) Melakukan koordinasi dalam kelompok.</li> </ol>	Kerja tim Toleransi Kepemimpinan Komunikasi
6	<i>Collaborative Learning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merancang tugas yang bersifat open ended.</li> <li>2) Sebagai fasilitator dan motivator.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri.</li> <li>2) Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas.</li> </ol>	Penghargaan Apresiasi pendapat/toleransi Networking Berbagi visi Group decision making Manajemen waktu
7	<i>Contextual Instruction</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun di lapangan.</li> <li>2) Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkan dengan situasi nyata atau kerja profesional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan studi lapangan/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.</li> <li>2) Membahas konsep atau teori yang berkaitan dengan situasi nyata</li> </ol>	Sintesis Analisis Responsif Apresiasi Pengalaman
8	<i>Project Based Learning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merumuskan tugas dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen. Sebagai fasilitator dan motivator.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis. Menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerja di forum.</li> </ol>	Taat asas Tanggung jawab Inovasi Kreatif Komunikasi Aktualisasi
9	<i>Problem Based Learning</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merangsang tugas belajar dengan berbagai alternatif metode penyelesaian masalah.</li> <li>2) Sebagai fasilitator dan motivator.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belajar dengan menggali atau mencari informasi (<i>inquiry</i>) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual atau yang sedang dihadapi.</li> <li>2) Menganalisis strategi pemecahan</li> </ol>	Prioritas Pengambilan Keputusan Berfikir kritis Selektif Tanggung jawab

			masalah.	
--	--	--	----------	--

### 3. Program Kuliah Diluar Program Studi

Program kuliah diluar program studi disebut sebagai mata kuliah kampus merdeka yang ditempuh selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dengan beban sks setara 20 (duapuluh) sks. Mata kuliah pilihan kampus merdeka, yang dipilih secara bebas oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen. Mata kuliah pilihan kampus merdeka merupakan program belajar mandiri yang langsung terjun kemasyarakat, dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dipilih, sebagai berikut:

- 1) Student Exchange
- 2) Internship/Practical Work
- 3) Teaching Assistance
- 4) Research
- 5) Humanitarian Project (Proyek Kemanusiaan)
- 6) Interpreneurship
- 7) Project Independent
- 8) Community Service Program (Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik)

### 4. Penilaian

Penilaian adalah proses pengukuran prestasi belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah, selama 1 (satu) semester pada program studi. Pihak yang berwenang untuk menetapkan nilai seorang mahasiswa adalah dosen/dosen penguji. Nilai ujian tengah semester (UTS) ditetapkan dengan angka (contoh: 80), sedangkan komponen penilaian akhir terdiri dari: kehadiran; tugas; UTS dan ujian akhir semester (UAS) yang bobotnya masing-masing disesuaikan berdasarkan kelompok mata kuliah. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dalam angka dan huruf dengan komposisi sebagai berikut:

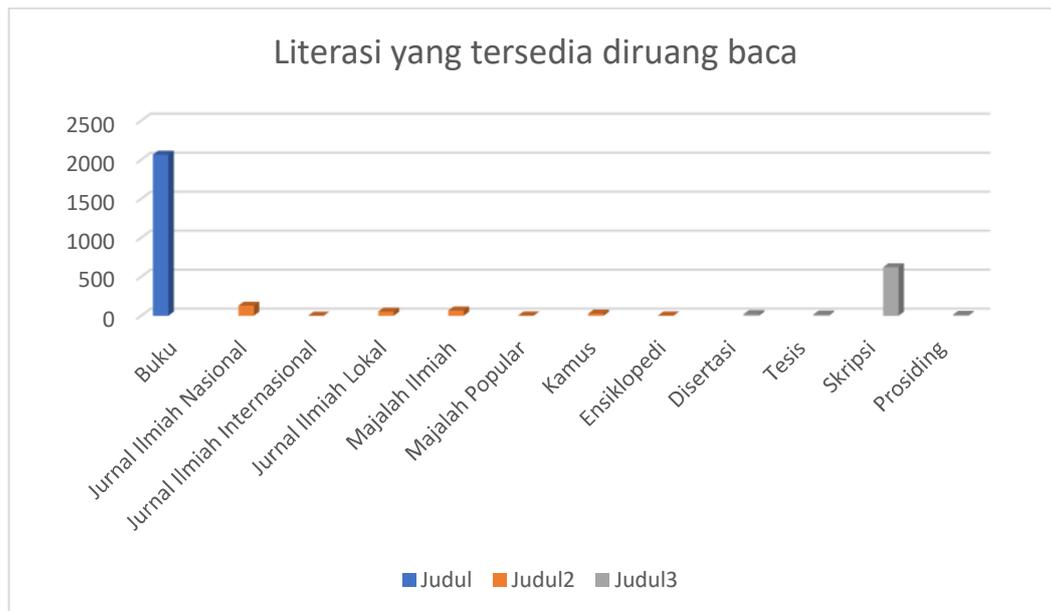
RANGE NILAI				KET
Huruf	Angka	Angka Mutu	Sebutan Mutu	
A	85-100	4.00	Dengan Pujian/Cumlaude	LULUS
A-	80-84,99	3.75	Sangat Baik Sekali	LULUS
B+	75-79,99	3.50	Baik Sekali	LULUS
B	70-74,99	3.00	Baik	LULUS
B-	65-69,99	2.75	Cukup Baik	LULUS
C	60-64,99	2.50	Lebih dari Cukup	LULUS
C	55-59,99	2.00	Cukup	LULUS
D	40-54,99	1.00	Kurang	WAJIB MENGULANG
E	<40	0.00	Gagal	TIDAK LULUS

### 5. Sarana Pembelajaran/Laboran

#### A. Sarana dan Prasarana akademik

Ruang kuliah yang dimiliki oleh FH UPN Veteran Jakarta sebanyak 8 Ruang Kelas untuk PS S1 dan 6 ruang kelas untuk PS MIH, 2 Ruang Diskusi, 2 Ruang Rapat, dan 2 Ruang Pelayanan

Mahasiswa, Ruang Laboratorium Peradilan Semu dan Komputer. Ruang kuliah dilengkapi dengan AC, Whiteboard, Layar dan Infocus Permanen. Untuk kelancaran belajar mahasiswa, FH UPNVJ menyiapkan ruang baca / Pojok literasi dengan segala fasilitas dengan jumlah Buku sebanyak 2064 Judul, Jurnal ilmiah Nasional 129 judul, Jurnal Ilmiah Internasional 2 judul, Jurnal Ilmiah Lokal 53 Judul, Majalah Ilmiah 67 Judul, Majalah Populer 3 Judul, Kamus 26 Judul, Ensiklopedi 3 Judul, Disertasi/ Tesis/ Skripsi 19/ 15/ 621, Laporan Penelitian 41 Judul dan Prosiding 12 Judul yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 4. Jumlah koleksi referensi

Selain ruang baca fakultas, saat ini pola pengelolaan perpustakaan dipusatkan di Universitas berskala nasional yang memiliki sarana dan prasarana menunjang untuk bisa koneksi dengan perpustakaan lain. Selain itu perpustakaan menyediakan akses beberapa jurnal internasional secara online. Luas gedung perpustakaan setiap lantainya adalah 10 x 10 meter terdiri dari tiga lantai.

## B. Lahan dan Bangunan

Fakultas Hukum menempati lahan milik Universitas dengan bangunan yang digunakan sendiri atau bersama dengan yang lain yaitu : gedung Yos Sudarso dengan 4 lantai dan gedung RA Kartini pada lantai dasar, lantai 2 dan lantai 3.

Tabel Ruangan FH

No .	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ruang Kantor	12	352.89	√		√		48 jam/minggu
2	Ruang Kelas	13	568.42	√		√		48 jam/minggu
3	Ruang Lab Peradilan Semu	3	84.68	√		√		48 jam/minggu
4	Ruang Lab Bersama	1	160					48 jam/minggu
5	Ruang Baca	1	47.98	√		√		48 jam/minggu

Tabel Ruangan Kerja Dosen FH

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen	1	32
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen	1	16

Satu ruang untuk 2 dosen	3	12
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)	25	100
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>

Tabel Prasarana Penunjang

No.	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Kondisi		Unit Pengelola
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Lapangan Basket	Z	200m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
2	Lapangan Bola	1	2000m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
3	Lapangan Bulu Tangkis	1	200m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
4	Lapangan Senam	1	500m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
5	Poliklinik	1	200m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
6	Auditorium	1	500m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
7	Lapangan Parkir	3	7000m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM

8	Masjid Manbaul Ulum	1	600m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
9	Kantin Bersama	1	800m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM
10	Koperasi	1	200m <sup>2</sup>	SD		Terawat		ROUM

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

## BAB V

### P E N U T U P

Kurikulum Kampus Merdeka 2020 Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UPNVJ, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kurikulum 2020 ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6.
2. Capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum ini dibagi menurut aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
3. Capaian pembelajaran aspek sikap dan keterampilan umum dan keterampilan khusus diturunkan dari profil lulusan.
4. Profil lulusan ini ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan industri, sekaligus untuk mendukung visi dan misi UPNVJ sebagai kampus yang beridentitas bela negara.
5. Mata kuliah dikelompokkan menjadi: mata kuliah wajib universitas (MKWU); mata kuliah wajib fakultas (MKWF)/mata kuliah wajib program studi (MKWPS); mata kuliah wajib program konsentrasi (MKWPK); dan mata kuliah pilihan kampus merdeka (MKPKM), serta program pelatihan bersertifikat.
6. Jumlah SKS yang harus ditempuh 150 SKS, dengan masa studi 8 semester, maksimal 14 semester.
7. Metode pembelajaran didasarkan pada metode *Student Centered Learning* (SCL) baik melalui tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh.

Jakarta, 30 Juli 2020

D e k a n

**Dr. Abdul Halim, M.Ag.**

**NIP. 196706081994031005**



Lampiran 1.

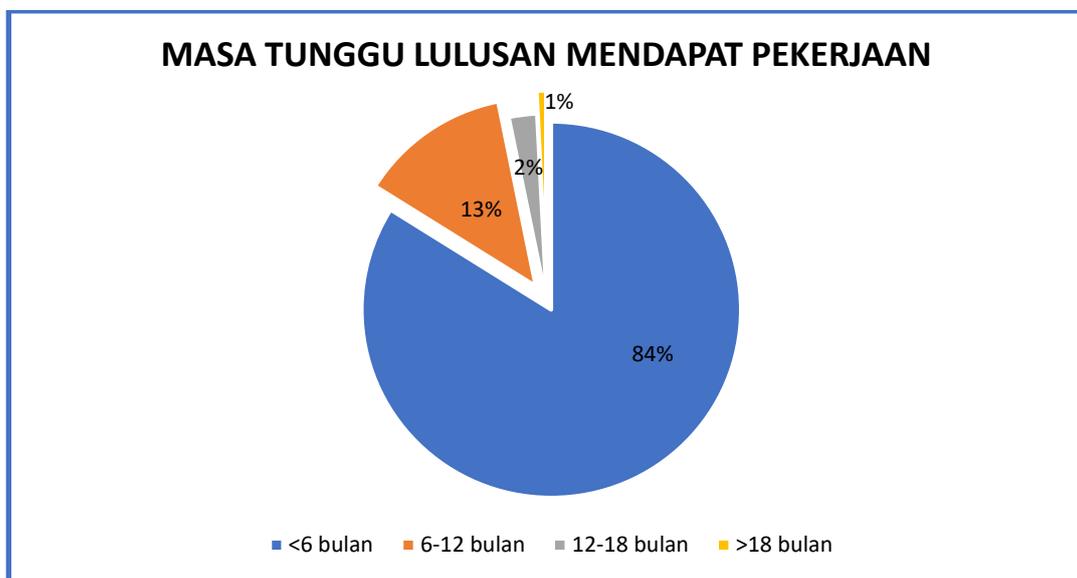
### Hasil Tracer Study

Jumlah alumni program studi S1 Hukum UPNVJ sampai dengan semester genap TA. 2019/2020 berjumlah 1.237 Partisipasi alumni dalam tracer study sebanyak 260 responden. Tracer study yang disebarkan ke alumni dilakukan untuk mengetahui, sebagai berikut:

- i. Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan;
- ii. Jenis pekerjaan tempat alumni bekerja;
- iii. Kessuaian bidang kerja dengan program studi;
- iv. Keterkaitan mata kuliah yang ditempuh dengan jenis pekerjaan;
- v. Kemampuan lain yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan.

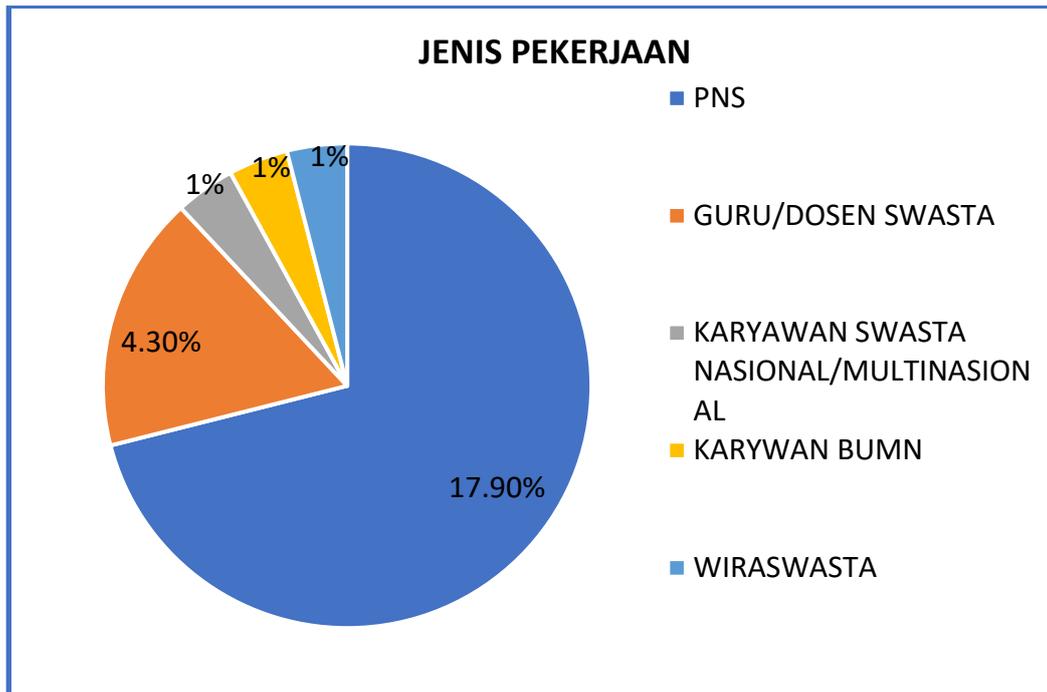
Hasil tracer study masing-masing kriteria dijelaskan dalam grafik, sebagai berikut:

1. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan rata-rata kurang dari 6 bulan, terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan yudisium dengan persentase 84%. Selanjutnya 13% alumni program studi hukum program sarjana mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6-12 bulan. Persentase alumni mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 12-18 bulan hanya 2% dan masih ada alumni yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu lebih dari 18 bulan.



Grafik 1. Masa Tunggu Lulusan Mendapat Pekerjaan

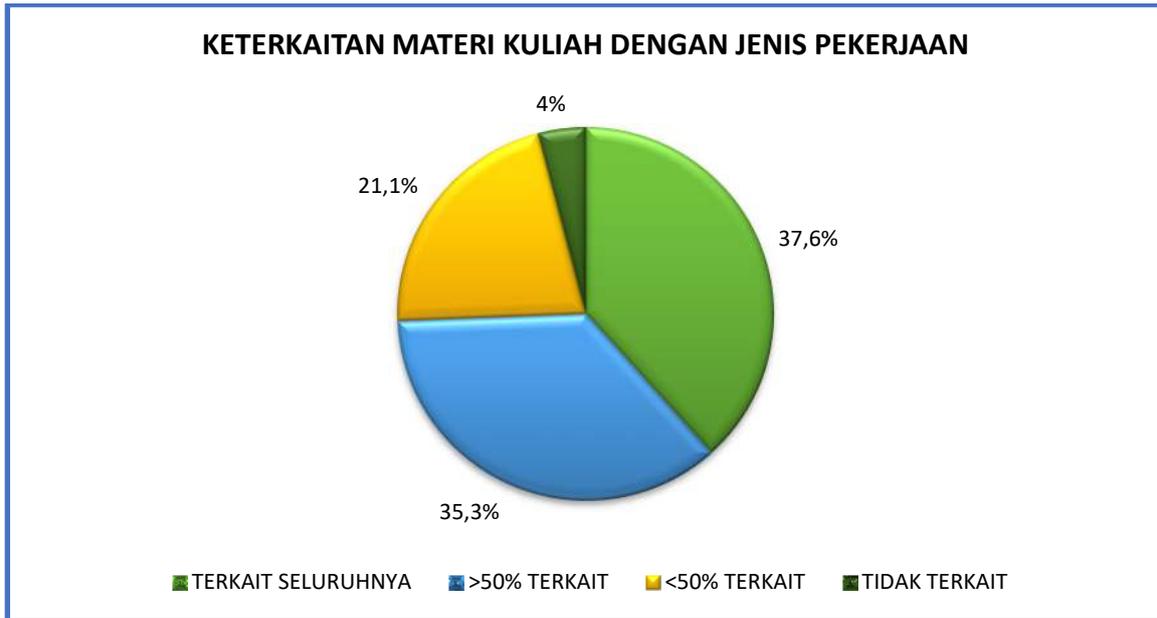
2. Persentase tertinggi jenis pekerjaan alumni program studi hukum program sarjana FH UPNVJ adalah sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dengan persentase 18% dan 4% sebagai guru atau dosen di sekolah atau universitas swasta di Indonesia. Selebihnya jenis pekerjaan yang diperoleh lulusan adalah sebagai karyawan swasta nasional atau multinasional, dan karyawan BUMN sebesar, serta sebagai wiraswastawan sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan alumni selama menempuh pendidikan di FH UPNVJ memenuhi kualifikasi untuk bekerja sebagai PNS dan guru atau dosen.



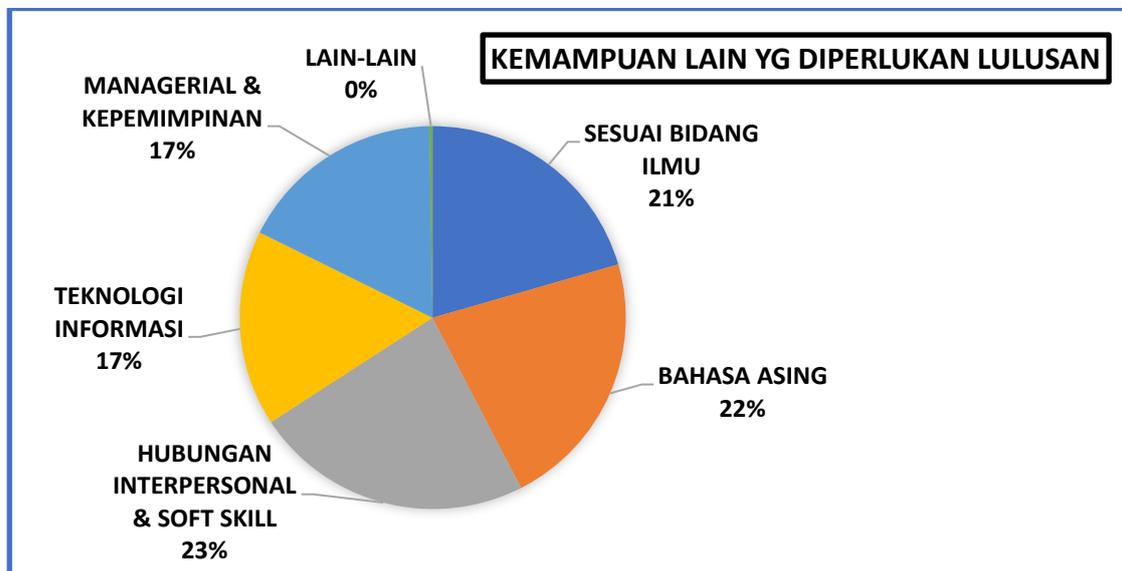
3. Kesesuaian bidang pekerjaan alumni dengan keilmuan atau mata kuliah yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di program studi hukum program sarjana FH UPNVJ, responden yang mengatakan sangat sesuai sebesar 59% dan 23% mengatakan sesuai. Sisanya sebesar 18% menyatakan tidak sesuai. Dengan adanya responden yang menyatakan adanya ketidak sesuaian bidang pekerjaan dengan ilmu sesuai program studi hukum, menunjukkan bahwa kualitas materi dalam proses pembelajaran dan dosen sangat perlu untuk ditingkatkan.



4. Tracer terhadap keterkaitan materi kuliah dengan jenis pekerjaan, sebesar 37,6% menyatakan sangat terkait. 35,3% menyatakan lebih dari 50% materi kuliah dapat diterapkan dalam pekerjaan. Sedangkan 21,1 % menyatakan kurang dari 50% materi kuliah di program studi hukum FH UPNVJ tidak ada relevansi dengan jenis pekerjaan, serta 4% menyatakan tidak terkait. Hal ini dapat diartikan bahwa kurang dari 50% materi kuliah yang diajarkan selama pendidikan sesuai dengan jenis pekerjaan alumni, bahkan ada alumni yang tidak bekerja dibidang hukum sehingga materi kuliah tidak terkait sama sekali dengan jenis pekerjaannya.



5. Rata-rata responden alumni menyatakan soft skill dan bahasa asing sebagai kemampuan lain yang diperlukan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai keilmuan. 23% responden menyatakan bahwa lulusan program studi hukum FH UPNVJ memerlukan kemampuan menjalin hubungan interpersonal dan soft skill, serta 22% menyatakan membutuhkan tambahan kemampuan bahasa asing. Selain hubungan interpersonal dan Bahasa asing, 17% lulusan menyatakan perlu pendalaman lebih lanjut terhadap materi kuliah di program studi hukum serta kemampuan terhadap keahlian dibidang teknologi informasi.



6. Alumni memberikan saran untuk pengembangan program studi hukum pogram sarjana dalam hal pengembangan infrastruktur sebesar 61,20% dan pengembangan kurikulum sebesar 55,80%. Selain pengembangan infrastruktur dan kurikulum, alumni memberikan saran untuk pengembangan institusi sebesar 52,4% dan pengembangan kemahasiswaan sebesar 46,90%.

**SARAN ALUMNI UTK PENGEMBANGAN PRODI SARJANA**

